

**ABSTRAKSI****Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kredit yang diambil oleh nasabah bkk di kabupaten Kebumen****Ariatne Bingarwati  
F0199018**

Ciri yang masih melekat dengan kental pada masyarakat pedesaan di Indonesia yaitu masih lemahnya pembentukan modal. Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah untuk membantu mengatasi masalah permodalan tersebut adalah dengan mendirikan suatu bentuk Badan Kredit Kecamatan yang kedudukannya ada di tiap-tiap kecamatan. Keberadaannya dinilai sangat sesuai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan, terutama bagi para pengusaha kecil.

Pada penelitian kali ini penulis mengajukan dua permasalahan yang hendak diteliti di BKK Kabupaten Kebumen. Masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh dan hubungan dari tingkat pendapatan, lama pendidikan, jangka waktu, serta tujuan pengembalian kredit terhadap tingkat kredit yang diambil oleh para nasabah. Permasalahan kedua adalah bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit ditinjau dari segi penggunaan kredit oleh nasabah serta perkembangan total kredit yang dikeluarkan oleh BKK se-Kabupaten Kebumen pada periode tahun 2000 sampai tahun 2003.

Untuk menjawab permasalahan yang pertama digunakan metode survey dengan data primer dan teknik penarikan sampel dengan menggunakan *stratified random sampling* serta *simple random sampling*. Untuk mengolah data digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan variabel dummy, uji t, uji F, uji R, uji  $R^2$  serta uji asumsi klasik. Untuk menguji permasalahan kedua, yaitu mengetahui proporsi penggunaan kredit, maka digunakan uji dua proporsi untuk membandingkan antara nasabah yang memakai untuk tujuan produktif dan selain untuk tujuan produktif, sedang untuk mengetahui trend dari total kredit digunakan analisis trend yang datanya diperoleh dari Badan Pengawas BKK Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapat hasil sebagai berikut, untuk hasil analisis regresi bahwa variabel tingkat pendapatan, jangka waktu serta variabel dummy tujuan penggunaan kredit mempunyai hubungan dan pengaruh positif terhadap tingkat kredit yang diambil. Sedangkan variabel tingkat pendidikan secara statistik tidak berpengaruh, hal ini disebabkan karena dalam pengajuan kredit tidak dilihat lama pendidikan nasabah, selain itu kebutuhan kredit yang diminta oleh nasabah tidak ditentukan pada lama pendidikannya. Untuk uji yang kedua yaitu uji hipotesis dua proporsi diperoleh hasil bahwa proporsi penggunaan kredit untuk tujuan produktif jauh lebih besar dari yang digunakan untuk tujuan lainnya, misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan. Sedangkan untuk analisis trend diperoleh hasil bahwa total

kredit yang dikeluarkan oleh BKK kabupaten Kebumen tiap tahun memiliki trend yang positif, dan rata-rata jumlah kredit yang tersalur tiap tahunnya adalah sebesar Rp 2.695.000,00

Dari beberapa kesimpulan yang dapat ditarik di atas, maka disarankan beberapa kebijakan sehubungan dengan penyaluran kredit dari BKK di Kabupaten Kebumen. Kebijakan yang pertama adalah perlunya pengkajian terhadap sosialisasi dari petugas BKK kepada masyarakat pedesaan dengan dilakukan penyuluhan atau pembinaan untuk menarik nasabah. Kebijakan yang ke dua adalah dengan memperpanjang jangka waktu pengembalian kredit agar dapat meringankan angsuran dari nasabah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pedesaan di Indonesia merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Hal ini disadari dengan adanya kenyataan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan. Penduduk tersebut sangat efektif bila digunakan sebagai modal utama pembangunan, namun kendala yang masih melekat sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan yaitu rendahnya pendidikan, ketrampilan yang rendah, serta pembentukan modal yang lemah.

Krisis ekonomi yang melanda Negara Indonesia telah berakibat terhadap peningkatan angka kemiskinan yang cukup tajam. Selama krisis berlangsung sektor usaha kecil dan menengah tetap *survive* untuk tetap dapat menggerakkan perekonomian nasional. Bahkan setelah krisis berlangsung, usaha kecil menengah tetap menjadi primadona untuk memulihkan perekonomian nasional. Pemberdayaan usaha kecil menengah sangat penting mengingat potensi usaha yang dimilikinya sangat besar, dimana dari 3,8 juta pengusaha Indonesia, sebanyak 99,8 % merupakan pengusaha kecil, sisanya sebanyak 0,2 % adalah pengusaha besar dan menengah. Di samping itu, usaha kecil dan menengah ternyata menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, sehingga dapat menekan jumlah pengangguran karena itu perlu diberdayakan seoptimal mungkin. Untuk itu, Pemerintah perlu membuat suatu sistem penyaluran kredit yang melibatkan instansi-instansi terkait yang benar-benar berkompeten dan mempunyai akses langsung kepada pengusaha kecil dan menengah.

Mengingat pentingnya pinjaman modal dan masih belum berhasilnya keberadaan lembaga perbankan besar dan modern dalam menyalurkan kredit pada masyarakat kecil, maka perlu dipikirkan suatu lembaga keuangan yang

mampu untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut yang sesuai dengan karakter dan budaya masyarakat pedesaan. Sesuai dengan kemampuan permodalan yang lemah dari masyarakat pedesaan, bentuk Badan Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan bentuk yang tepat untuk didirikan, sekaligus sebagai lembaga keuangan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah. Dalam usaha mikro, perbankan swasta jarang masuk, dan inilah yang menjadi lahan bagi BPR.

Tugas BPR adalah memberikan kredit kepada pengusaha kecil dan para pedagang sektor informal lainnya di pasar-pasar dan di desa-desa. Selain jumlah peminjamnya yang sangat besar, jumlah pinjaman yang dibutuhkan sangat kecil. Sementara itu barang-barang sebagai jaminan pinjaman sangat terbatas dan sukar untuk pengikatannya. Salah satu bentuk BPR yang akan dibahas pada penelitian kali ini adalah Badan Kredit Kecamatan, dengan kedudukannya di kecamatan dianggap bisa lebih menyentuh atau mengerti kebutuhan masyarakat pedesaan. Dengan sasarannya para golongan ekonomi lemah yaitu petani, peternak, nelayan, serta para pengusaha kecil yang dirasa belum bisa terjangkau keberadaannya oleh bank umum serta agar mereka tidak jatuh ke tangan para pelepas uang (rentenir dan pengijon). Keberadaannya diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dari golongan ekonomi lemah, terutama para pengusaha kecil.

BPR mulai dimasyarakatkan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, di mana bank ini disebut dengan bank sekunder atau bank pedesaan atau rural bank. Setelah Paket 27 Oktober (Pakto 27) istilah

BPR disebut secara resmi dalam Keppres No. 38 Tahun 1988. Selanjutnya eksistensi BPR dikukuhkan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 7 /1992 tentang BPR. Dalam kegiatannya selama ini, operasional BPR dibagi dalam tiga kelompok, yakni BPR non-BKD (Badan Kredit Desa), BPR BKD dan LDKP (Lembaga Dana Kredit Pedesaan). BPR non BKD terdiri dari BPR baru yang didirikan setelah UU No. 7/1992, bank Pasar/Bank Desa, BKPD (Bank Karya Produksi Desa) dan ex LDKP. BPR BKD terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa. Sedangkan LDKP yang berada dalam pengawasan Bank Pembangunan Daerah terdiri dari Badan Kredit Kecamatan (BKK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LKP), Lumbung Pitih Nagari (LPN), dan lain-lain. Jumlah BPR Non BKD sampai dengan Tahun 1998 mencapai 2227 bank, BPR BKD sebanyak 5.345 bank sementara LDKP sebanyak 1.809 bank (Bank dan Manajemen, September 1998).

Di Jawa Tengah perkembangan BPR/BKK cukup menggembirakan, jumlahnya mencapai 510 unit dengan perincian 310 unit berstatus BPR dan 160 unit berstatus BKK dengan jumlah pegawai 4.912 orang. Adanya peningkatan perkembangan usaha tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BKK cukup tinggi. Dapat diartikan bahwa BKK dinilai mampu melaksanakan intermediasi dengan baik, serta mampu menyalurkan kembali dana masyarakat untuk dapat mengembangkan usaha. Belakangan ini BPR/BKK di Jawa Tengah mendapat kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp15 Miliar untuk mendorong kegiatan usaha di wilayah. Kucuran dana yang dimaksud dimasukkan dalam APBD Jawa Tengah sebagai upaya untuk

pemulihan ekonomi di pedesaan, sehingga pada akhirnya akan dapat meningkatkan pemasukan ke kas daerah menjadi lebih besar. Kredit yang tersalur di BKK dapat digolongkan menurut jenis penggunaan dan penggunaannya dalam sektor-sektor ekonomi. Menurut jenis penggunaannya dibedakan menjadi 3 macam, yaitu untuk investasi, untuk modal kerja, dan untuk konsumsi. Ditinjau dari sektor ekonomi, kredit dibagi menurut sektor pertanian, perburuhan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan lain-lain. Dari jumlah kredit yang tersalur selama ini, proporsi penggunaan kredit terbesar adalah digunakan sebagai modal kerja.

Pada penelitian kali ini, penulis mengambil lokasi penelitian di BKK Kabupaten Kebumen, baik yang sudah berbentuk BPR maupun yang belum. Perkembangan BKK di Kabupaten Kebumen dilihat dari posisi kredit dari tahun 2002 sampai tahun 2003 dari masing-masing BKK telah menunjukkan perkembangan yang cukup berarti. Berikut perkembangan dari masing-masing BKK di Kabupaten Kebumen dilihat dari nilai kreditnya.

Tabel 1.1  
Pertumbuhan Total Kredit BKK Kabupaten Kebumen  
Tahun 2002-2003

No	BKK	Nilai Kredit (Tahun 2002)	Nilai Kredit (Tahun 2003)	Pertumbuhan (Rupiah)
1	Rowokele	810.380	1.558.200	747.820
2	Petanahan	1.167.336	1.756.613	589.277
3	Sempor	1.286.658	1.739.237	452.579
4	Buayan	859.876	1.470.200	610.324

5	Ayah	1.386.906	2.009.823	622.917
6	Mirit	1.310.337	1.204.632	(105.705)
7	Puring	1.075.723	1.032.463	(43.260)
8	Gombang	1.507.452	2.295.271	787.819
9	Alian	1.105.595	1.489.409	383.814
10	Karangayam	679.208	730.086	50.860
11	Karanganyar	817.212	961.000	143.788
12	Kuwarasan	802.850	1.148.400	245.550
13	Ambal	683.382	1.149.004	465.622
14	Adimulyo	856.839	998.720	141.881
15	Klirong	857.903	1.167.140	309.237
16	Kebumen	915.846	1.738.514	822.668
17	Kutowinangun	1.080.237	1.536.386	456.149
18	Prembun	844.321	1.403.110	558.789
19	Sadang	526.331	428.124	(98.207)
20	Pejagoan	762.905	1.220.293	457.388
21	Buluspesantren	475.517	511.888	36.371
22	Sruweng	733.112	895.215	162.103
	Jumlah	20.545.926	28.443.710	7.897.784

Sumber: BP BPR/BKK Kab. Kebumen, 2003

Dilihat dari perkembangan total kredit dari tahun 2002 sampai 2003 terdapat 3 BKK yang mengalami penurunan total kredit yang disalurkan, yaitu BKK Mirit, Puring, dan Sadang. BKK yang paling banyak mengalami penurunan adalah BKK Mirit, yaitu sebesar Rp 105.705,00 disusul oleh BKK Sadang sebesar Rp 98.207,00 dan yang terakhir adalah BKK Puring menurun sebanyak Rp 43.260,00. BKK yang mengalami peningkatan total kredit terbanyak adalah BKK Kebumen, yakni sebanyak Rp 822.668,00 kemudian disusul BKK Gombang sebesar Rp 787.819,00. Pada penelitian kali ini, penulis menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit oleh nasabah di BPR/BKK serta pelaksanaan penyaluran kreditnya.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan, lama pendidikan, jangka waktu pengembalian kredit serta tujuan pengambilan terhadap jumlah kredit yang diambil oleh nasabah?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran kredit ditinjau dari proporsi penggunaan kredit dan perkembangan total kredit tersalur dari tahun ke tahun?

**C. Tujuan Penelitian**

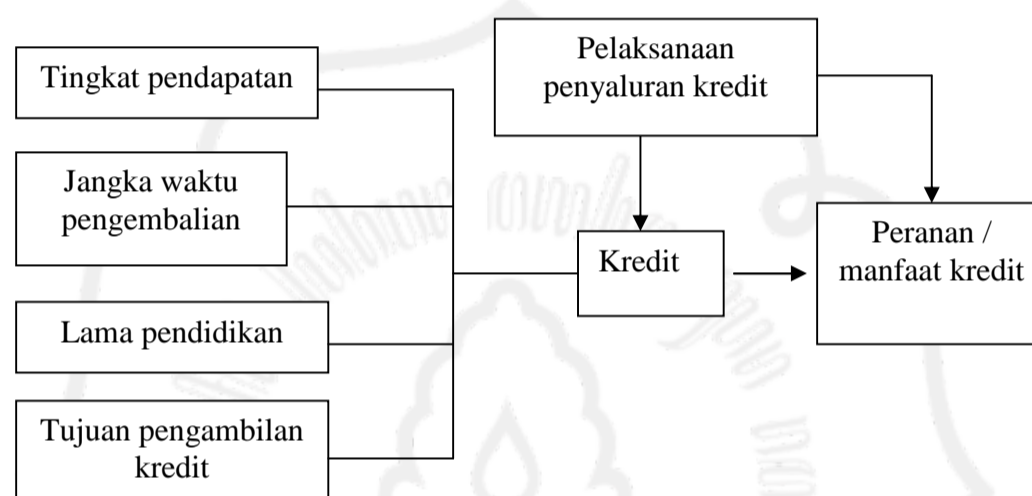
1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, lama pendidikan, jangka waktu serta tujuan pengambilan terhadap tingkat kredit.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penyaluran kredit dilihat dari proporsi penggunaan kredit dan perkembangan total kredit tersalur dari tahun ke tahun.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi penulis untuk memperluas wawasan dan sebagai aplikasi dari teori yang selama ini diberikan.
2. Untuk memberikan informasi tentang kondisi lapangan yang bisa dijadikan masukan untuk mengambil kebijaksanaan lebih lanjut mengenai masyarakat pedesaan.
3. Guna memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan

## E. Kerangka Penelitian

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan tingkat kredit yang dibahas oleh penulis adalah tingkat pendapatan, lama pendidikan, jangka waktu, serta tujuan pengambilan kredit tersebut. Untuk dapat mengetahui apakah kredit tersebut telah dapat mencapai manfaatnya, yakni sesuai dengan tujuan didirikan BPR untuk membantu permodalan pengusaha kecil, maka dapat dilihat dari pelaksanaan penyaluran kreditnya dari sisi proporsi penggunaan/peranan kredit digunakan untuk tujuan produktif dan perkembangan jumlah kredit yang tersalur dari tahun ke tahun.



Gambar 1.1  
Skema Kerangka Pemikiran

Selain variabel-variabel yang terdapat di dalam kerangka pemikiran ini, diasumsikan bahwa faktor-faktor yang berada di luar penelitian ini walaupun dapat mempengaruhi analisis dianggap konstan



## F. Hipotesis

1. Faktor pendapatan, tingkat pendidikan, jangka waktu pengembalian, serta tujuan pengambilan berpengaruh secara nyata dan berhubungan positif terhadap tingkat kredit.
2. Penyaluran kredit sudah dapat mencapai tujuan dilihat dari proporsi penggunaan kredit untuk tujuan produktif serta adanya peningkatan jumlah kredit tersalur dari tahun ke tahun.

## G. Metode Penelitian

### 1. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan mengambil sampel para nasabah yang mengambil kredit BKK. Para debitur yang diambil adalah dari semua golongan tanpa dibeda-bedakan. Dari 22 BKK yang tersebar di tiap kecamatan dipilih 4 BKK berdasarkan kriteria perkembangan penyaluran kreditnya dari tahun lalu.

### 2. Metode Penarikan sampel

Teknik yang digunakan adalah *stratified random sampling*, merupakan teknik menarik sampel dengan membagi populasi ke dalam kelompok strata, kemudian sampel diambil dari tiap kelompok dengan strata dengan proporsi tertentu, sehingga setiap sampel yang terambil mewakili tiap kelompok (Sugiarto, 2001 : 73). Dalam penelitian kali ini strata yang digunakan adalah perkembangan total kredit yang disalurkan oleh masing-masing BKK, yaitu meningkat dari tahun lalu, serta menurun dari tahun lalu. Populasi dari masing-masing strata adalah 19 BKK untuk strata meningkat dari tahun lalu, sedangkan 3 BKK untuk strata menurun total kreditnya dari

tahun lalu (BP BKK Kabupaten Kebumen 2003). Sedangkan untuk besar sampel BKK dipilih secara random dari masing-masing strata, untuk total kredit yang meningkat diambil sampel 3, yaitu BKK Alian, BKK Kebumen, dan BKK Pejagoan. Untuk BKK yang total kredit menurun diambil 1 BKK, yaitu BKK Sadang. Selanjutnya untuk mengambil sampel responden dilakukan dengan *simple random sampling* dengan jumlah keseluruhan responden adalah 100 orang dengan populasi sebesar 31.740 orang. Pengambilan sampel berdasarkan Arkin dan Colton (1957 : 136-137) bahwa pada populasi sebanyak 30.000 orang dengan interval keyakinan 95 % dan standar error  $\pm 10\%$ , maka sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang.

### **3. Jenis dan sumber data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari para responden yang diperoleh dari lapangan, sedangkan data sekunder berupa data yang diperoleh dari Badan Pengawas (BP) BKK Kabupaten Kebumen dan BPS.

### **4. Metode Pengumpulan data**

Metode yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara atau komunikasi. Metode ini adalah dengan menggunakan wawancara atau komunikasi. Metode ini adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dan sumber data yang disebut responden (Hadari Nawawi, 1983:110). Alat pengumpulan data adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden (Hadari Nawawi, 1983: 117)

### **5. Definisi Operasional Variabel**

- a. Tingkat kredit merupakan jumlah kredit yang diambil oleh masing-masing nasabah, dihitung dalam satuan Rupiah.
- b. Pendapatan adalah sejumlah uang yang merupakan gaji/upah yang diterima oleh nasabah selama satu bulan, dihitung dalam satuan Rupiah.

- c. Lama pendidikan merupakan jenjang pendidikan yang pernah dijalani oleh responden. Perhitungan waktu didasarkan pada lama pendidikan yang pernah ditempuh secara umum
- d. Jangka waktu pengembalian kredit merupakan rentang waktu yang diambil oleh nasabah pada waktu mengajukan kredit sampai dengan waktu pengembalian kredit tersebut. Jangka waktu dinyatakan dalam satuan bulan.
- e. Tujuan pengambilan kredit yaitu tujuan nasabah mengambil kredit. Pengukuran variabel ini menggunakan variabel dummy, dimana untuk  $D=1$  menunjukkan masyarakat yang mengambil kredit untuk tujuan usaha atau produktif, dan sebaliknya  $D=0$  untuk masyarakat yang mengambil kredit untuk tujuan konsumtif.

## 6. Metode Analisis Data

### a. Analisis Regresi Berganda

Teknik yang digunakan untuk membuktikan hipotesis yang pertama adalah menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini menggunakan satu variabel dependen dan empat variabel independen. Apabila ditulis secara sistematis adalah sebagai berikut:

$$K = \alpha + \beta_1\chi_1 + \beta_2\chi_2 + \beta_3\chi_3 + \beta_4D_i + \varepsilon_1$$

Dimana :

$K$  = Tingkat kredit yang diambil

$\alpha$  = Konstanta

$\chi_1$  = Pendapatan nasabah

$\chi_2$  = Lama pendidikan

$\chi_3$  = Jangka waktu

$D_i$  = Tujuan pengambilan kredit

$\beta_i$  = Koefisien intersep

Tahap selanjutnya adalah melakukan beberapa pengujian untuk melihat tingkat signifikansi koefisien regresi dan uji hipotesis

Pengujian yang dilakukan terhadap model di atas adalah :

#### 1) Uji statistik

##### a) Uji t

Uji ini adalah uji secara individual dari semua koefisien regresi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah koefisien regresi variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang dilakukan adalah :

$H_0: \alpha = 0$  ini berarti tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

$H_a: \alpha \neq 0$ , ini berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat

Dengan menggunakan t tabel dan t hitung maka:

Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} < -t_{tabel}$ ,  $H_0$  ditolak atau menerima  $H_a$  berarti ada variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen

Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ ,  $H_0$  diterima atau menolak  $H_a$  berarti variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

Cara lain untuk menguji signifikan tidaknya koefisien regresi adalah dengan menggunakan probabilitasnya. Jika nilai probabilitas  $< 0,05$ , maka koefisien regresi itu signifikan pada tingkat 5%, sebaliknya, jika probabilitas  $> 0,05$  maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan pada tingkat 5%. Hal ini juga berlaku untuk  $\alpha = 10\%$  dan  $15\%$

b) Uji F (serempak)

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan adalah

$H_0 : \alpha = 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen

$H_a : \alpha \neq 0$  artinya secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen

Dengan menggunakan F tabel dan F hitung maka jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen.

c) Koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ )

Pengukuran ini dimaksudkan untuk melihat kebaikan regresi yang dicocokkan terhadap sekumpulan data koefisien majemuk. Secara verbal  $R^2$  mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi yang dijelaskan oleh model regresi dua sifat  $R^2$ .  $R^2$  merupakan besaran non negatif. Besarannya adalah  $0 < R^2 < 1$ . Suatu  $R^2$  mendekati satu berarti kecocokan sempurna sedangkan mendekati nol berarti tidak ada hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Tapi khususnya  $R^2$  terletak antara kedua ekstrem ini kecocokan model dikatakan lebih  $R^2$  semakin dekat dengan satu (Damodar Gujarati, 1993: 45)

2) Uji asumsi klasik

a) Autokorelasi

Adalah adanya keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada varian lain yang tidak random. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati tidak bias dan variannya tidak minimum sehingga tidak efisien untuk mendeteksi tidak adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin – Watson).

$$d = 2 \left[ \frac{1 - \sum e_i e_i - 1}{\sum e_i} \right]$$

b) Heteroskedastisitas

Terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas adalah penaksir tidak bias, tapi tidak efisien. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park. Nilai residual hasil regresi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas, dan dilakukan uji t. Jika signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak maka tidak terdapat heteroskedastisitas di dalamnya.

c) Multikolinearitas

Uji ini berarti ada hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika dalam model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai  $r^2$  dengan  $R^2$ . Jika nilai  $r^2 < R^2$  maka dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, sebaliknya jika  $r^2 > R^2$  maka model tersebut mengandung masalah multikolinearitas.

**b. Uji hipotesis proporsi**

Untuk menguji hipotesis yang ke dua digunakan uji hipotesis dua proporsi. Uji hipotesis dua proporsi digunakan untuk mengetahui apakah penyaluran kredit yang dilakukan sudah dapat mencapai tujuan (efektif) atau belum, yaitu digunakan untuk meningkatkan usahanya atau produktif dengan membandingkan proporsi antara nasabah yang menggunakan kreditnya untuk tujuan produktif dengan yang menggunakan untuk tujuan konsumtif.

Langkah-langkah adalah sebagai berikut (Djarwanto, 1993: 214):

1) Menentukan formulasi  $H_0$  dan  $H_1$

$$H_0 : P_0 = 50 \%$$

$$H_1 : P_0 > 50 \%$$

2) Menentukan level of signifikan

3) Rule of test

$$H_0 \text{ diterima bila } Z \geq \alpha/2$$

$$H_0 \text{ ditolak bila } Z < \alpha/2$$

4) Perhitungan nilai Z

$$Z = \frac{\frac{x}{n} - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}}$$

5) Kesimpulan :  $H_0$  ditolak atau diterima

### c. Analisis Trend

Analisis ini digunakan untuk mengetahui perkembangan jumlah kredit yang tersalur selama ini. Analisis Trend yang digunakan adalah Metode Last Square. Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut

1) Mendefinisikan rumus umum trend:  $Y = a + bx$

Y = variabel yang berfluktuasi

X = periode waktu

a = nilai Y bila  $x = 0$

b = koefisien slope garis trend

2) Menentukan nilai koefisien a dan b

Menggunakan analisis regresi sederhana untuk mencari koefisien a dan b

Bila  $b < 0$  maka perkembangan trend adalah turun

Bila  $b > 0$  maka perkembangan trend adalah naik

3) Uji statistik

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependen

a) Menentukan hipotesis

$H_0$  : Koefisien regresi tidak signifikan

$H_1$  : Koefisien regresi signifikan

b) Menentukan  $\alpha$

c) Kriteria Pengujian

Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

d) Kesimpulan

Hoditolakatauditerima

## BAB II LANDASAN TEORI

## **A. Lembaga Keuangan**

### **1. Definisi Lembaga Keuangan**

Pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam suatu periode membutuhkan modal (kapital) pada tingkat tertentu. Banyak sumber pembiayaan yang dapat diperoleh, misalnya yang berasal dari tabungan masyarakat. Agar potensi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan ekonomi, perlu disalurkan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan modal untuk membiayai kegiatan produktif. Lembaga keuangan merupakan suatu wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat. Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian. Fungsi dari lembaga keuangan adalah mentransfer dana-dana (*loanable funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit (Subagyo, 1999:3).

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990

Lembaga keuangan diberikan batasan sebagai semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna memenuhi investasi perusahaan. Namun, dengan peraturan tersebut tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan hanya pada investasi perusahaan, namun bisa untuk kegiatan konsumsi, modal kerja, dan distribusi barang dan jasa.

### **2. Jenis dan fungsi Lembaga Keuangan**

Secara umum, Lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yaitu bank dan bukan bank. Perbedaan yang tampak menonjol diantara keduanya adalah dalam hal penghimpunan dana, dimana bank dapat menghimpun dana baik secara langsung maupun yang tidak langsung, sedangkan lembaga keuangan non bank hanya dapat menghimpun dana secara tidak langsung dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga keuangan Bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum mempunyai kemampuan lebih dalam hal menghimpun dana, sehingga dana yang berhasil dihimpun juga cenderung relatif lebih besar. Bank Umum didefinisikan oleh Undang-Undang No 10 tahun 1998 sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasar Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa secara umum BPR mempunyai kegiatan usaha yang lebih terbatas dibandingkan bank umum. Bank umum dapat menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam hal melakukan usaha perasuransian, BPR dan Bank Umum sama-sama tidak diperbolehkan.

Secara umum, fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam berbagai tujuan (*financial intermediary*).

Secara spesifik fungsi bank adalah sebagai berikut (Y Sri Susilo dkk, 2000:6):

a. *Agent of trust*



Dasar utama kegiatan bank adalah trust atau kepercayaan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkannya. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsur kepercayaan. Pihak bank sendiri akan mau menyalurkan dananya kepada debitur apabila dilandasi dengan kepercayaan, percaya bahwa debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajibannya pada saat jatuh temponya.

*b. Agent of development*

Bank berfungsi untuk memperlancar kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, terutama untuk menggerakkan perekonomian di sektor riil. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik pula. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi akan membangun kegiatan perekonomian masyarakat.

*c. Agent of service*

Bank memberikan jasa-jasa yang erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian pada umumnya. Jasa-jasanya antara lain: jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan.

## **B. Perkreditan**

### **1. Pengertian dan tujuan kredit**

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah bank. Berdasarkan Undang – Undang No. 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan disertai pemberian bunga.

Kegiatan penyaluran kredit bank tersebut pada prinsipnya dapat dibagi dalam tiga sasaran pokok yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan kredit oleh masyarakat yang merupakan tugas bank.
- b. Untuk menciptakan atau memperkuat hubungan nasabah dengan membiayai usaha yang memenuhi syarat untuk kredit.
- c. Kegiatan perkreditan merupakan sumber utama dari hasil usaha bank, pentingnya penyaluran kredit bagi perbankan dapat dilihat dari komposisi penyaluran dana yang sampai saat ini masih tetap didominasi oleh pos kredit.

Tujuan dari kredit adalah keuntungan atau *profitability* yang terjelma dalam bentuk bunga yang diperoleh, dan karena Pancasila sebagai dasar negara, maka tujuan kredit tidak semata untuk mencari keuntungan namun untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian maka tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank adalah (Thomas Suyatno, 1992:14):

- a. Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.
- c. Memperoleh agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperoleh usahanya.

Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan adanya kepentingan yang seimbang antara kepentingan pemerintah, kepentingan rakyat, dan kepentingan pemilih modal (pengusaha).

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan dari pihak kreditur berkenaan dengan dana yang dipinjamkan kepada debitur (berupa uang, barang, dan jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang

b. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan dengan cara mengadakan perjanjian yang ditandatangani oleh pihak debitur dan kreditur berkaitan dengan pinjaman dana dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

c. Jangka waktu

Jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati beserta jatuh temponya. Jangka waktu dapat dibedakan antara jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

d. Resiko

Dalam bisnis perbankan khususnya pemberian fasilitas kredit mengandung resiko yang besar karena berkenaan dengan dana yang dipinjamkan. Resiko kredit timbul apabila terjadi kredit macet/bermasalah

e. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberinan suatu kredit atau jasa. Balas jasa dapat berupa bunga atau biaya administrasi. Balas jasa ini merupakan keuntungan yang diterima oleh pihak bank.

## 2. Analisis Pemberian Kredit

Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan yang sehat ada beberapa analisis, yaitu ( Dahlan Siamat,1995:211):

a. *Character*

Penilaian terhadap nasabah perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon nasabah debitur untuk membayar kembali kredit yang diterimanya.

b. *Capacity*

Penilaian terhadap debitur dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan debitur mengembalikan pokok pinjaman serta bunga pinjamannya. Penilaian kemampuan membayar tersebut dilihat dari kegiatan usaha dan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan atas usaha yang akan dibiayai melalui kredit.

c. *Kapital*

Bank dalam melakukan penilaian atas jumlah modal yang dimiliki debitur yang perlu dilihat adalah apakah debitur memiliki modal yang memadai dalam menjalankan usahanya.

*d. Collateral*

Penilaian terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit bank yang diperolehnya adalah untuk mengetahui sejauh mana nilai barang atau agunan tersebut dapat menutupi resiko kegagalan pengembalian kewajiban-kewajiban debitur. Fungsi jaminan ini sebagai alat pengamanan terhadap kemungkinan untuk ketidakmampuan debitur melunasi kredit yang dimintanya.

*e. Condition of economy*

Penilaian terhadap *condition of economy* adalah untuk mengetahui kondisi pada suatu saat di suatu daerah yang mungkin akan mempengaruhi kelancaran usaha debitur. Kondisi ini termasuk pula peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan nasabah.

*f. Constraint*

Constraint merupakan faktor hambatan dan keterbatasan yang dapat timbul dalam perkreditan, oleh karena itu dalam proses pemutusan kredit perlu dilakukan penelitian mengenai kemungkinan timbulnya hambatan-hambatan

yang pada gilirannya nanti dapat mengganggu kelancaran pembayaran kembali kredit.

### 3. Fungsi Kredit

Sebagai Lembaga keuangan peranan bank dalam perekonomian sangatlah dominan. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan bank dengan fasilitas kreditnya. Begitu dominannya pemberian kredit bank sampai banyak ahli berpendapat bahwa tidak satupun usaha bisnis di dunia ini yang dapat bebas dari kredit. Bahkan negara kayapun banyak memerlukan kredit dari lembaga – lembaga keuangan internasional, apalagi bagi negara – negara menengah dan miskin.

Di bawah ini merupakan fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan. Fungsi – fungsi kredit dalam garis besar adalah sebagai berikut ( Thomas Suyatno, 1993:16):

a. Kredit meningkatkan daya guna uang

Para pemilik modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan untuk meningkatkan usahanya.

b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalulintas uang

Kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalulintas akan berkembang pula.

c. Kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut meningkat. Di samping itu dengan kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang dari satu tempat ke tempat lain.

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat.

Arus kredit diarahkan pada sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

e. Kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek baru-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut.

f. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank-bank usaha di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan dalam negeri.

#### 4. Jenis-Jenis Kredit

a. Atas dasar penggunaan dana oleh debitur (Dahlan Siamat, 1993:204)

1). Kredit Investasi ( KI )

Kredit ini dipergunakan untuk nasabah yang membutuhkan modal investasi atau pembelian barang modal. Jangka waktu kredit investasi didasarkan pada kemampuan untuk membayar kembali proyek yang dibiayai sebagaimana tercermin dari proyeksi dana yang bersangkutan. Kredit ini bisa berupa jangka panjang atau menengah, karena nilainya yang relatif besar dan cara pelunasannya oleh nasabah melalui angsuran.

2). Kredit Modal Kerja

Kredit ini diberikan untuk membantu kebutuhan modal kerja yang diperlukan untuk melaksanakan operasi usaha. Modal kerja merupakan modal yang habis sekali pakai dalam masa proses produksi, misalnya bahan baku minyak, listrik, dan lain-lain.

3). Kredit Konsumsi

Merupakan kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha debitur.

b. Atas dasar cara penarikan dana

1). Cash loan

Kredit ini memungkinkan nasabah untuk menarik dana secara tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus. Yang termasuk dalam kredit jenis ini adalah Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Nasabah dapat menarik dana tunai secara langsung untuk membiayai berbagai kegiatan usaha nasabah seperti modal kerja dan dana investasi

2). Non cash loan

Kredit ini tidak memungkinkan nasabah untuk menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan secara khusus tejangka waktu kredit tentu. Yang termasuk dalam kredit ini adalah Bank garansi dan *Letter of kredit*.

c. Berdasarkan Jangka waktu

1). Kredit jangka pendek

Kredit yang jangka waktu pengembalian kredit kurang dari satu tahun. Misalnya kredit modal kerja atau disebut pula sebagai kredit jangka pendek.

2). Kredit jangka menengah

Kredit yang jangka waktu pengembaliannya melebihi kredit jangka pendek dan kurang dari jangka waktu kredit jangka panjang. Kurun waktunya menurut Undang-Undang Perbankan adalah 3 tahun, namun untuk sekop yang lebih luas jangka waktunya biasanya berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun.

3). Kredit jangka panjang

Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari kredit jangka menengah. Jangka waktunya berkisar antara 3 sampai dengan 5 tahun.



d. Berdasarkan barang jaminan

1). Kredit dengan jaminan

Kredit yang diberikan dengan penyerahan barang jaminan oleh nasabah. Jenis barang jaminan sangat tergantung dengan jenis kredit yang diberikan, misalnya kredit komersial untuk modal kerja, barang jaminan dapat berupa persediaan atau barang yang merupakan objek pembiayaan kredit.

2). Kredit tanpa jaminan

Kredit ini diberikan tanpa memberikan suatu jaminan apapun. Bagi nasabah yang telah memiliki hubungan baik sebagai nasabah yang bersangkutan, bank biasanya dapat memberikan kredit kepada nasabah tersebut tanpa adanya suatu jaminan. Pemberian kredit tanpa jaminan ini dilakukan sepanjang prinsip-prinsip penilaian kredit lainnya menurut analisa kredit terpenuhi.

Dalam memberikan kredit harus mempertimbangkan resiko atau *degree of risk*. Resiko yang ada sedikit mungkin diperkecil, sehingga Bank Indonesia tidak menghadapi berbagai kesulitan. Kredit yang diberikan kepada para debitur pasti ada resiko dan sulit dihilangkan, hanya saja faktor resiko harus diminimalkan. Sebaliknya, kredit yang diberikan oleh pihak perbankan diusahakan merata, artinya kredit tersebut jangan hanya diberikan kepada suatu atau segolongan saja, sebab jika debitur tersebut jatuh bangkrut maka bank tersebut akan jatuh pula., sehingga perlu adanya azas-azas dalam perkreditan. Azas-azas dalam perkreditan meliputi (M. Sinungan, 1992:233):

a. Azas kualitas

Kredit yang diberikan hanya pada suatu usaha saja, tetapi sebaliknya harus ada satu pemerataan terhadap banyak jenis usaha.

b. Azas kuantitas

Kredit yang diberikan jangan terlalu besar, sebaiknya kecil saja dan diberikan kepada banyak nasabah.

c. Azas selektifitas

Azas selektifitas ini dianut oleh seluruh perbankan karena perbankan karena merupakan cara yang baik dalam pencapaian tujuan usaha bank. Debitur-debitur diseleksi menurut bonafiditasnya, kegiatan usaha sekarang dan kemungkinannya di masa yang akan datang, kestabilan dan kemampuan manajemennya. Penekanan terletak pada *willingnes to pay dan ability to pay* (kemauan dan kemampuan untuk membayar)

Kredit menurut sektor ekonomi didasarkan atas klasifikasi menurut *Internasional Standar Industrial Classification all economic activities (ISIC)* yang dianut perbankan. Rincian sektor ekonomi tersebut didasarkan atas dasar kebutuhan untuk menentukan kebijakan pengarahannya kredit bank secara kualitatif yang dititikberatkan pada sector ekonomi yang diutamakan dalam pembiayaan dengan kredit bank itu. Sektor ekonomi tersebut dirinci atas :

a. Sektor pertanian

Yaitu usaha-usaha untuk memproduksi hasil tanaman, perikanan, peternakan, serta kehutanan dan pematangan kayu.

b. Sektor pertambangan

Sektor ini meliputi usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas.

c. Sektor perindustrian

Meliputi kegiatan mengubah bentuk (transformasi) pengolahan, baik secara mekanis maupun kimiawi dari satu bahan baku menjadi barang jadi yang dikerjakan mesin, manusia, dan lain-lain

d. Sektor Perdagangan

Sektor ini meliputi kegiatan ekspor, impor, distribusi, hotel, dan restoran.

e. Sektor Jasa

Meliputi kegiatan real estate, profesi selain dokter, (notaris, akuntan, dan lain-lain), usaha sewa beli barang modal, dan lain-lain.

f. Sektor lain-lain

Sektor-sektor ekonomi yang tidak termasuk dalam salah satu kategori di atas.

### C. Peranan Modal Dalam Proses Produksi

Salah satu faktor produksi yang diperlukan dalam suatu usaha adalah dana/modal, selain faktor produksi tanah dan tenaga kerja. Kedudukan modal lebih menonjol dalam pengertian ekonomi. Modal merupakan barang atau uang yang bersama dengan faktor produksi lain menghasilkan barang baru atau sebagai alat untuk memupuk pendapatan. Menciptakan modal berarti menyisihkan sebagian kekayaan atau sebagian hasil produksinya untuk maksud produktif bukan maksud konsumtif.

Dalam membicarakan peranan modal tidak akan lepas dari masalah kredit., sehingga sering terjadi kerancuan antara pengertian modal dan kredit. Modal selain diperoleh dari kekayaan sendiri juga dapat dipinjam dari pihak lain yang disebut dengan kredit. Dengan demikian modal dapat dibagi menjadi dua, yaitu modal sendiri (*equity capital*) dan modal pinjaman (*credit*) (Mubyarto, 1987:93).

Dalam proses produksi tidak ada perbedaan apapun antara modal sendiri dan modal pinjaman. Masing-masing menyumbang secara langsung dalam proses produksi. Bedanya untuk pinjaman harus dikembalikan beserta bunganya. Peranan modal merupakan unsur penting dalam suatu kegiatan usaha produksi. Modal akan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kekurangan modal dan ketrampilan akan mengakibatkan rendahnya pendapatan perkapita, sehingga perlu dilaksanakan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan modal dalam masyarakat.

Dengan tersedianya dana/modal yang mencukupi, maka hampir semua faktor-faktor produksi yang lain dapat dibeli. Dengan tersedianya faktor-faktor produksi yang lengkap akan memberi kesempatan bagi pengembangan usahanya. Timbulnya lapangan kegiatan usaha yang baru sudah barang tentu akan memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga akan menyediakan lapangan kerja yang baru bagi para tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan faktor-faktor produksi tersebut luas

Penyaluran kredit pedesaan merupakan salah satu cara untuk membantu keluarga miskin di Indonesia dalam meningkatkan pendapatan, lembaga kredit dan pengembangannya merupakan salah satu alat kebijakan yang strategis untuk menjangkau pengusaha ekonomi lemah. Berdasarkan penelitian dan pengalaman banyak negara, kredit merupakan cara yang paling efektif untuk menanggulangi permasalahan modal di pedesaan.

Pemberian kredit yang tepat berarti akan menciptakan lapangan kegiatan usaha, dan lapangan kegiatan usaha akan menciptakan lapangan kerja yang baru. Dengan diperolehnya lapangan kegiatan usaha oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha tersebut, maka pendapatan akan meningkat. Semakin besar kegiatan usaha tersebut dikuasai, maka akan memungkinkan untuk menerima

pendapatan yang semakin besar pula, dan pada akhirnya semakin besar pula terjadinya pemerataan pendapatan. Proses tersebut akan mudah dipahami karena kenaikan likuiditas akibat dari kredit yang diterimanya akan mengalami pelipatgandaan ( *multiplier effect* ) dalam perekonomian dari satu sektor ke sektor lain dan kemudian akan menimbulkan kesempatan kerja yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan.

#### **D. Badan Kredit Kecamatan (BKK)**

##### **1. Sejarah singkat BKK**

BKK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 September 1969 no: Dsa. G 226/1969 Jo tanggal 19 November 1970 No Dsa G 3231/ 1970 dengan status BKK pada saat itu sebagai proyek. Mengingat status BKK adalah proyek, yang berarti bahwa suatu saat harus berakhir, keadaan ini tidak sesuai dengan kondisi dan situasi dimana masyarakat ekonomi lemah sangat mendambakan pinjaman modal. Untuk meningkatkan usahanya. Bertolak dari keadaan inilah, maka mendorong Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan DPRD memantapkan dasar hukum BKK menjadi Perda No. 11 Tahun 1981 yang kemudian merubah status proyek menjadi BUMD milik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, yang antara lain menentukan bahwa di setiap kecamatan di Jawa Tengah didirikan sebuah unit BKK yang berkantor induk di ibukota kecamatan, dan untuk meningkatkan pelayanan dalam operasinya di desa-desa atau pasar-pasar dibuka pasar-pasar dibuka pos pelayanan (Mubyarto, 1987:18) :

BKK didirikan untuk meningkatkan produktivitas dari pedagang kecil, pengrajin kecil, peternak, home industri, usaha jasa dan para petani kecil. Tujuan didirikan BKK secara umum adalah sebagai berikut

- a. Mendekatkan modal kepada masyarakat di pedesaan dengan cara mudah, murah, dan mengarah

- b. Melindungi masyarakat pedesaan dari jebakan para lintah darat ( *money lenders* )
- c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha di pedesaan
- d. Mendidik masyarakat pedesaan agar gemar menabung

Dengan tujuan pendirian BKK di atas, maka diharapkan keberadaan BKK dapat memberikan pemerataan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, dengan bantuan modal bisa meningkatkan produktivitas usaha dan golongan ekonomi lemah khususnya para pedagang kecil.

Dalam pelaksanaan fungsinya, BKK berpegang kepada prinsip, yaitu berusaha menyediakan modal kepada golongan ekonomi lemah di pedesaan, dalam hal ini warga masyarakat yang berkarakter baik dan menurut lingkungannya dan berkemauan untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan cara berusaha. Dalam operasinya, hal tersebut dilakukan dengan membuka pos-pos di desa-desa dalam wilayah kecamatan masing-masing di mana BKK berdiri. Sistem pinjamannya disesuaikan dengan macam penerimaan penghasilan masyarakat di pedesaan, cara mengangsurnya diatur dengan mudah, sehingga nasabah yang sederhana dan sangat rendah pendidikannya pun dapat memenuhi ketentuan yang ada dengan mudah.

Penyaluran kredit lewat BKK relatif mudah, dengan persyaratan-persyaratannya yang lebih sederhana, serta waktu memperoleh kredit yang lebih cepat daripada kredit dari lembaga-lembaga kredit formal yang lain. Di samping itu, kalau dibandingkan dengan lembaga kredit informal, maka bunga kredit dari BKK relatif lebih murah. Dalam hal organisasi. Pada BKK pejabat pemerintah (camat, bupati, walikota) setempat ikut terlibat di dalamnya, dan hal ini berakibat positif, yaitu menimbulkan kepercayaan dan kesetiaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban hutang-hutangnya.

## 2. Fungsi, tugas dan maksud BKK

Sesuai dengan anggaran dasar BKK mempunyai fungsi, tugas, maksud, dan tujuan sebagai berikut:

### a. Fungsi

Sebagai salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan / perbankan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Tugas

- 1). Membantu menyediakan modal usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di pedesaan

- 2). Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah, mengarah dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha di pedesaan.
- 3). Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan
- 4). Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah

### c. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan didirikan BKK adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, maka perlu adanya dasar pedoman dalam pelaksanaan operasional, sehingga jelas arah dan tujuan yang akan dicapai. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Biaya.

### 3. Struktur Organisasi

Tabel 3.1

Struktur Organisasi PD BPR/BKK



Berdasarkan struktur organisasi tersebut dapat diketahui tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan:

a. Pemegang saham

PD BPR/BKK sahamnya dimiliki oleh 3 pemegang saham, yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten, dan PT. Bank BPD Jawa Tengah. Gubernur bertanggungjawab atas pengelolaan semua BKK di wilayah propinsi Jawa tengah. Pelaksanaan tugas ini dibantu oleh Badan Pembina Tingkat I. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan BKK di wilayahnya dibantu oleh Badan Pembina Tingkat II. Sedangkan BPD Jawa Tengah bertugas membina dan mengawasi teknis perkreditan BKK.

b. Badan Pengawas

Di bawah pemegang saham terdapat Badan Pengawas. Badan ini bertugas melakukan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi terhadap BKK di wilayahnya. Meneliti dan mengolah laporan bulanan kegiatan perkembangan, rencana kerja dan anggaran pendapatan belanja serta laporan neraca dan rugi/laba BKK kemudian menyusun laporan bulanan dan tahunan perkembangan di wilayahnya. Badan ini biasanya terdiri atas Kepala Bagian Perekonomian daerah setempat yang dibantu oleh sekretaris dan anggotanya.

c. Pimpinan

Di bawahnya terdapat Pimpinan BPR/BKK yang membawahi beberapa karyawan. Pimpinan itu sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi dalam melaksanakan tugas serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengawasan, serta meneliti kegiatan perkreditan dan penghimpunan dana.

d. Petugas BKK

Petugas BKK dibagi menjadi beberapa divisi yang masing-masing memiliki tugas sesuai dengan bidangnya. Kasi Pemasaran bertugas membantu Pimpinan dalam hal menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan memasarkan produk jasa-jasa. Menyusun rencana kerja dan anggaran kerja serta mengevaluasinya. Kasi Pelayanan mempunyai tugas dalam bidang pembukuan, kesekretariatan umum dan personalia. Menyusun laporan untuk kepentingan intern dan ekstern dalam bidang tugasnya.

Keberhasilan dalam pengelolaan perusahaan daerah akan terwujud apabila organisasi tersebut terdapat satu kesatuan untuk meningkatkan pelayanan di segala bidang, terutama untuk menarik nasabahnya. Sumber daya manusia yang profesional sangat menentukan keberhasilan tujuan perusahaan. Dari jumlah karyawan yang ada difungsikan untuk mengembangkan kegiatan usaha bank. Cara yang ditempuh adalah:

a. Pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing



- b. Mengadakan pembinaan dan pengawasan seauai dengan struktur organisasi yang ada serta meningkatkan komunikasi antar seksi yang ada guna meningkatkan pelayanan.
- c. Mengikutsertakan para karyawan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, BP BKK tingkat Propinsi, Tingkat Kabupaten, maupun yang diselenggarakan lembaga lain guna meningkatkan kualitas sumber daya pegawai.

#### 4. Penghimpunan dan Penyaluran dana di BKK

Penghimpunan dana BKK yang selama ini dilakukan adalah dengan membuka tabungan dan deposito berjangka. Tabungan yang dibuka adalah dua macam, yaitu tamades dan tabungan wajib

##### a. Tabungan

###### 1) Tamades

Langkah yang dilakukan untuk memasyarakatkan adalah dengan mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan “jemput bola “ ke dinas instansi yang potensial. Khusus untuk kredit pegawai diwajibkan untuk menabung 5% dari plafon kredit yang akan dipotong pada saat pencairan kredit. Selain itu, dilakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat untuk mengadakan promosi dan pemberian hadiah kepada nasabah penabung.

###### 2) Tabungan wajib

Tabungan ini mewajibkan setiap nasabah kredit untuk menabung sebesar 10% dari plafon kredit dan tabungan ini dapat diambil sewaktu-waktu.

##### b. Deposito berjangka

Deposito ini dipromosikan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat yang potensial serta dengan mengadakan pengarahan di dalam pertemuan serta memberikan hadiah kepada para deposan. Penyetoran minimal yang dikenakan untuk deposito adalah sebesar Rp1.000.000,00

Penyaluran dana yang dilakukan dititikberatkan pada sektor ekonomi, dengan jalan menggali potensi yang ada dengan menghubungi objek yang produktif. Sektor yang menjadi sasaran adalah sektor perdagangan, sektor industri, dinas/instansi dan lembaga masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan pelayanan mudah, murah, dan mengarah. Ada beberapa cara untuk dapat menjaga tingkat kesehatan kredit yang akan ditempuh, yaitu:

- a. Mengadakan analisa kepada calon nasabah serta menggunakan prosedur yang benar-benar sesuai dengan ketentuan.
- b. Mengadakan penagihan secara rutin kepada kredit non lancar

- c. Melaksanakan penyelamatan kredit
- d. Mengadakan penghapusan kredit macet setelah mendapat persetujuan.

#### **D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Masyarakat**

##### **1. Pendapatan**

Pendapatan secara umum merupakan penghasilan yang diterima baik yang berupa gaji/upah, pendapatan dari usaha, maupun pendapatan dari yang lainnya. Dalam penelitian ini lebih dikhususkan kepada pendapatan pribadi, yang dapat diartikan sebagai sebuah jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu atau kegiatan apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara (Sadono Sukirno, 1994:49). Tingkat pendapatan digunakan sebagai penilaian terpenting dalam penerimaan jumlah kredit yang diminta, karena pendapatan tersebut merupakan sumber utama untuk mengangsur dari kredit tersebut. Pihak kreditur akan mempertimbangkan besar kredit yang diminta disesuaikan dengan kemampuan pendapatannya agar tidak mengalami kesulitan dalam pengembaliannya.

##### **2. Pendidikan**

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja, teratur, dan terarah dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan (Gondo Prayitno, 1980:28). Variabel pendidikan merupakan variabel yang memiliki peranan dalam merubah status dan pandangan hidup seseorang. Seseorang akan merasa memiliki kredibilitas yang lebih tinggi apabila memiliki tingkat pendidikan yang lebih dibanding masyarakat sekitarnya. Sikap hidup seseorang akan tercermin dari tingkat pendidikannya, karena orang yang berpendidikan tinggi lebih dapat memandang suatu permasalahan dengan penalaran yang lebih sehat. Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, hal ini tercermin bahwa dengan semakin besar tingkat pendapatan seseorang, maka tingkat pendidikan juga akan semakin tinggi.

##### **3. Jangka waktu pengembalian kredit**

Jangka waktu yang dimaksud adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk dapat mengembalikan seluruh kredit yang diambilnya. Jangka waktu pengembalian kredit adalah merupakan cerminan adanya resiko yang mungkin terjadi. Semakin lama jangka waktu pengembalian kredit bahwa semakin besar, maka akan semakin besar pula resikonya (Thomas Suyatno dkk, 1993:94). Kemampuan seseorang untuk mengembalikan kredit yang diambilnya dapat dilihat dari lamanya jangka waktu pengembalian dan disesuaikan dengan tingkat pendapatannya itu sendiri.

#### **E. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan kredit telah banyak dilakukan oleh para mahasiswa maupun kalangan akademis lainnya. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Endah Sri Wulandari dalam

skripsinya dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Kredit Dari BMT”. Penelitian tersebut berlokasi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta dengan menggunakan data primer *cross section*. Respondennya adalah para pedagang kecil dan menengah. Teknik untuk menarik sampel adalah dengan teknik purposive random sampling. Dari analisis data dengan menggunakan regresi linear berganda, dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif terhadap jumlah kredit yang diambil. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi variabel pendapatan sebesar 0,63 dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 pada taraf signifikan 5%. Ini berarti bahwa tingkat pendapatan akan menentukan jumlah kredit yang diambil.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Agustinus Sulisty Tri Putrato pada tahun 1996 dengan judul “Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Oleh BKK terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten”. Dari penelitiannya diketahui bahwa ada pengaruh antara variabel modal, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan sistem pinjaman terhadap pengambilan kredit. Variabel yang paling menentukan dalam pengambilan kredit adalah variabel sistem pinjaman, sedang yang paling lemah pengaruhnya adalah variabel modal.

### BAB III

## GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Keadaan Geografis Dan Pemerintahan

Kabupaten Kebumen terletak pada  $7^{\circ} 27' - 7^{\circ}50'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}22' - 109^{\circ}50'$  Bujur timur serta berada pada ketinggian antara  $18,2^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$  dengan curah hujan mencapai 3.385 mm per tahun. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pantai selatan yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Banyumas

Luas wilayah Kabupaten Kebumen adalah 128.111,50 hektar atau 1.281.115  $\text{Km}^2$ . Menurut penggunaannya, tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanah sawah dan tanah kering. Luas tanah sawah adalah 39.725,00 hektar, sedangkan tanah kering sebesar 88.386,50 hektar. Tanah sawah digunakan untuk irigasi teknis, irigasi sederhana PU, irigasi sederhana non PU, dan sawah tadah hujan. Penggunaan yang paling banyak adalah digunakan sebagai irigasi teknis, yaitu sebesar 39.866.000 hektar.

Penggunaan tanah kering sebagian besar untuk mendirikan bangunan dan lahan sekitar, sisanya digunakan untuk tegalan, penggembalaan, tambak, kolam, dan lain-lain. Tanah kering yang digunakan untuk mendirikan bangunan sebesar 35.562,00 hektar, kemudian sebesar 31.140,57 hektar digunakan sebagai tegalan/kebun. Berikut adalah perincian penggunaan tanah di Kabupaten Kebumen secara rinci.

Tabel 3.1  
Luas Wilayah Kab. Kebumen Menurut Penggunaannya

Penggunaan tanah	Luas wilayah (hektar)
A. Tanah sawah	39.725
1. Irigasi teknis	19.173
2. Irigasi ½ teknis	3.573
3. Irigasi sederhana PU	2.155
4. Irigasi sederhana Non PU	994
5. Sawah tadah hujan	13.866
B. Tanah Kering	88.368
1. Bangunan dan lahan sekitar	35.562
2. Tegalan / kebun	31.140
3. Tanah penggembalaan	63
4. Tambak	21
5. Kolam	45
6. Tanah sementara tidak diusahakan	247
7. Tanaman kayu-kayuan	298
8. Hutan negara	17.034
9. Tanah lainnya	4004
Jumlah	128.111

Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2001

Pemerintahan Kabupaten Kebumen meliputi 22 kecamatan, 11 kelurahan, lingkungan/dusun sebanyak 1.795 buah, Rukun Warga sebanyak 1.830 buah, Rukun Tetangga sebanyak 6.580 buah, dan desa sebanyak 449 buah. Jumlah desa dan kelurahan yang terbanyak di Kabupaten Kebumen terdapat di Kecamatan Mirit, disusul oleh Ambal, Kebumen, dan Alian. Di Kecamatan Mirit terdapat 401 RT, 16 RW, 124 dusun, dan 33 desa. Di Kebumen memiliki 563 RT, 130 RW, 88 Dusun, dan 29 kelurahan dan desa. Berikut nama kecamatan serta perinciannya berdasar banyaknya RT, RW dan jumlah Desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen

Tabel 3.2  
Banyaknya RT, RW Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Kebumen Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2001

No	Kecamatan	Banyaknya
----	-----------	-----------

		RT	RW	Dusun	Kelurahan	Desa	Jmh
1	Ayah	383	79	47	-	18	18
2	Buayan	316	85	83	-	20	20
3	Puring	276	160	108	-	23	23
4	Petanahan	250	77	87	-	21	21
5	Klirong	298	97	88	-	24	24
6	Bulus Pesantren	282	81	77	-	21	21
7	Ambal	302	117	138	-	32	32
8.	Mirit	401	16	124	-	33	33
9	Prembun	205	55	74	-	22	22
10	Kutowinangun	219	99	87	-	19	19
11	Alian	316	104	97	-	27	27
12	Kebumen	563	130	88	5	24	29
13	Pejagoan	243	63	59	-	13	13
14	Sruweng	308	96	78	-	21	21
15	Adimulyo	230	80	90	-	23	23
16	Kuwarasan	219	81	86	-	22	22
17	Rowokele	283	62	58	-	11	11
18	Sempor	331	65	51	-	16	16
19	Gombang	212	67	63	2	12	14
20	Karanganyar	235	60	57	4	7	11
21	Karanggayam	359	68	69	-	19	19
22	Sadang	349	88	86	-	21	21
	Jumlah	6.580	1.830	1.795	11	449	460

Sumber: BPS Kab. Kebumen, 2001

## **B. Aspek Kependudukan**

### **1. Pertumbuhan Penduduk**

Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berikut ini akan dirinci pertumbuhan penduduk menurut masing-masing kecamatan dari tahun 2000 sampai tahun 2001 .

Tabel 3.3

## Keadaan Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Kebumen

Tahun 2000-2001 Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk 2000	Penduduk 2001	Pertumbuhan jiwa (orang)	Pertumbuhan (%)
1	Ayah	51.840	51.935	95	0,18
2	Buayan	53.431	53.940	509	0,95
3	Puring	51.501	51.882	381	0,74
4	Petanahan	50.378	50.869	491	0,97
5	Klirong	52.910	53.617	707	1,34
6	Bulus Pesantren	50.591	51.530	759	1,50
7	Ambal	55.008	55.504	496	0,90
8	Mirit	66.160	66.381	221	0,33
9	Prembun	41.192	41.345	153	0,37
10	Kutowinangun	42.654	42.965	311	0,73
11	Alian	69.847	70.472	625	0,89
12	Kebumen	115.542	116.087	545	0,47
13	Pejagoan	44.918	45.441	523	1,16
14	Sruweng	52.807	53.170	363	0,69
15	Adimulyo	33.503	33.927	424	1,27
16	Kuwarasan	41.768	42.389	621	1,49
17	Rowokele	42.188	42.632	444	1,005
18	Sempor	59.805	60.426	621	1,04
19	Gombong	47.852	48.001	149	0,31
20	Karanganyar	33.395	33.761	366	1,10
21	Karanggayam	49.475	49.881	406	0,82
22	Sadang	58.175	58.331	156	0,27
	Jumlah	1.1164.940	1.174.306	9.366	0,80

Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2001

Jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen 2001 mengalami pertumbuhan 0,80 persen, yaitu peningkatan sebanyak 9.366 jiwa dibandingkan jumlah pada tahun 2000, yaitu dari 1.164.940 jiwa menjadi 1.174.306 jiwa pada tahun 2001. Jumlah penduduk terpadat pada tahun 2001 terdapat pada Kecamatan Kebumen berjumlah sebesar 116.087 jiwa dengan pertumbuhan sebesar 0,47% disusul oleh Kecamatan Alian dengan jumlah penduduk 70.472 jiwa dan pertumbuhan 0,89 %.

Dilihat dari tingkat pertumbuhannya, Kecamatan Bulus pesantren paling besar yaitu 1,50 % disusul oleh Kecamatan Kuwarasan 1,49 %.

## 2. Jumlah Penduduk menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Pada data dari BPS Kabupaten Kebumen pada tahun 2001 terdapat jumlah penduduk sebanyak 1.174.306 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 588.652 jiwa atau sebesar 50,12%, dan penduduk perempuan sebanyak 585.654 jiwa atau sebesar 49,87 % yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kebumen. Dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen presentase penyebaran penduduk yang paling besar ada di Kecamatan Kebumen, yaitu sebesar 9,89 %, terbesar kedua pada Kecamatan Alian, yakni sebesar 6,00 % dan terbesar ketiga diduduki oleh Kecamatan Mirit sebesar 5,65% Berikut adalah tabel tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelaminnya

Tabel 3.4  
Komposisi Penduduk menurut Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	51.912	50.101	102.013
5 – 9	59.622	123.311	182.933
10 – 14	70.410	66.275	136.685
15 – 19	56.724	123.256	179.980
20 – 24	42.770	39.750	82.520
25 – 29	36.461	39.496	75.957
30 – 34	38.590	43.602	82.192
35 – 39	40.398	43.846	84.244
40 – 44	37.930	38.794	76.724
45 – 49	31.473	30.147	61.620
50 – 54	24.014	25.803	49.817
50 - 59	20.902	21.914	42.816
60 +	20.289	23.656	43.945

Jumlah	588.652	585.54	1.174.308
--------	---------	--------	-----------

Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2001

Dari tabel di atas tampak bahwa dari segi umur, yang paling banyak adalah pada kelompok 5 – 9 tahun yaitu sebanyak 182.933 jiwa atau sebanyak 15,57 %, selanjutnya terbanyak ke dua ada pada kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 179.980 jiwa atau 15,32 %. Sedangkan kelompok besar yang ke tiga adalah usia 0 – 4 tahun sebanyak 102,013 atau 8,6%. Dilihat dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin dan umur, maka golongan laki-laki dan perempuan hampir sama, tidak ada perbedaan yang mencolok, baik secara keseluruhan maupun kelompok umur.

## C. Aspek Sosial, Ekonomi dan Budaya

### 1. Pendidikan

Peranan pendidikan merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan mendapat perhatian cukup besar dalam mendidik untuk mendapatkan manusia yang pandai, berpengetahuan, berprestasi dan mempunyai keahlian. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah telah mengerahkan dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dari adanya Program Inpres dan Banpres untuk pendidikan. Pemerintah juga mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, yang sebelumnya hanya sampai sembilan tahun. Agar lebih jelas maka disajikan tabel tentang banyaknya fasilitas pendidikan yang sangat menunjang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5

Jenis dan Jumlah Sarana Pendidikan Di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Pendidikan	Jumlah Gedung
1	TK	479



2	SD	981
3	SLTP	167
4	SLTA	73
5	Akademi	1
6	Perguruan Tinggi	-
	Jumlah	1.701

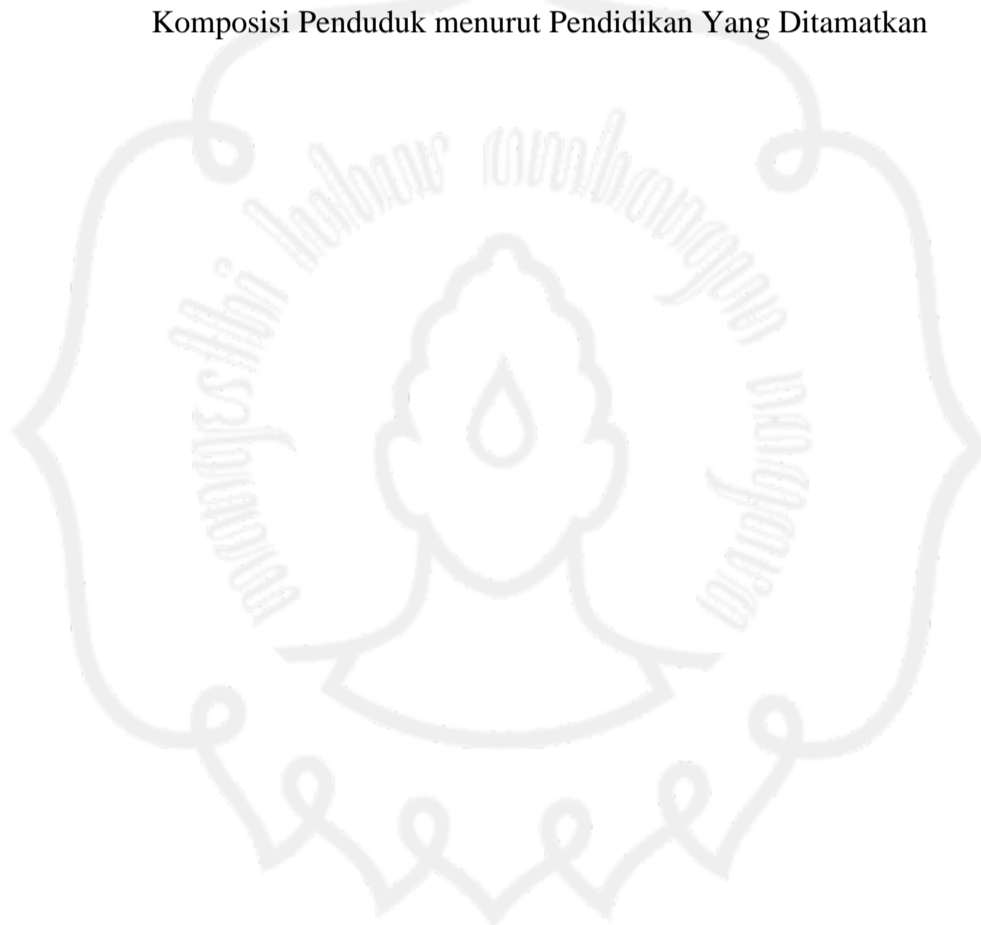
Sumber : BPS Kab. Kebumen, 2001

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Kabupaten Kebumen telah memiliki fasilitas dari pendidikan dasar sampai pendidikan setinggi diploma. Sarana terbanyak adalah pada gedung sekolah SD yang memiliki gedung sebanyak 981 buah, disusul oleh gedung TK sebanyak 479 dan terbanyak ke tiga adalah gedung SLTP yaitu sebanyak 167 buah. Banyaknya tersedia gedung SD tersebut disebabkan karena banyak anak-anak usia Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga untuk menampungnya diperlukan fasilitas yang memadai.

Selain jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia, perlu juga diketahui komposisi penduduk di Kabupaten Kebumen ditinjau dari segi pendidikan yang telah ditamatkannya. Berikut ini adalah tabel mengenai komposisi penduduk menurut pendidikan yang telah ditamatkannya.

Tabel 3.6

Komposisi Penduduk menurut Pendidikan Yang Ditamatkan



Kecamatan	Tingkat pendidikan yang ditamatkan						
	Tdk/blm tmt SD	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	Jmh
Ayah	16.291	23.508	5.620	1.995	237	111	47.762
Buayan	18.904	23.479	4.534	1.937	158	73	49.085
Puring	17.879	19.645	6.707	2.616	257	120	47.224
Petanahan	15.582	19.531	6.614	4.053	383	253	46.416
Klirong	05.707	20.776	6.624	4.763	547	312	48.729
BulusPesantren	15.915	21.480	5.505	3.480	326	186	46.892
Ambal	22.435	18.625	5.580	3.308	301	194	50.443
Mirit	27.976	22.012	6.927	3.541	364	262	61.082
Prembun	12.055	16.521	5.169	3.439	444	265	37.893
Kutowinangun	12.048	16.580	5.455	4.469	374	363	39.289
Alian	26.648	27.203	5.513	3.495	444	260	63.563
Kebumen	30.650	40.783	16.363	15.063	1.790	1.790	106.342
Pejagoan	13890	16.925	5.760	4.146	240	240	41.302
Sruweng	14.595	21.270	7.345	4.763	276	276	48.611
Adimulyo	8.198	12.776	5.784	4.040	139	139	31.175
Kuwarasan	11.514	18.011	5.394	3.121	149	149	38.495
Rowokele	16.440	16.801	3.493	1.697	98	98	38.708
Sempor	22.515	22.866	5.656	3.693	171	171	55.199
Gombong	11.042	14.666	8.461	8.728	773	773	44.551
Karanganyar	8.749	12.557	5.012	3.927	238	238	30.982
Karanggayam	24.614	17.098	2.496	1.037	25	25	45.359
Sadang	24.046	24.893	2.861	1.137	65	65	53.191
Jumlah	387.693	448.006	132.873	88.448	8.910	6.363	1.072.293

Sumber: BPS Kab. Kebumen,2000

Dari jumlah penduduk sekitar 1.072.293 orang yang mengenyam tingkat pendidikan, sebagian besar hanya mengenyam pendidikan sampai tamat SD/ MI, yaitu sebanyak 448.006 orang atau sekitar 41,18% dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah penduduk yang tidak / belum tamat Sdsebanyak 36% dari seluruh jumlah penduduk, tamat SLTP sebanyak 132.873 jiwa atau 12,39 % dari seluruh jumlah penduduk, tamat SLTA sebanyak 88.448 jiwa atau 8,2 %, tamat Akademi/D3 sebanyak 8.910 jiwa atau 0,8% , dan tamat Sarjana sebanyak 6.363atau 0,5%. Dari 22 kecamatan yang ada, jumlah penduduk yang paling banyak mengenyam tingkat pendidikan adalah Kecamatan Kebumen, yaitu

sebanyak 106.342 jiwa, terbesar ke dua adalah Kecamatan Alian, sebanyak 63.563 jiwa, terbesar ke tiga Kecamatan Mirit sebanyak 61.082 jiwa

## 2. Jumlah Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri

Tenaga kerja di Kabupaten Kebumen banyak tersebar di berbagai jenis industri yang berkembang. Ada berbagai macam jenis industri yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari industri kerajinan rumah tangga, industri kecil, industri menengah, dan industri besar. Industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri kerajinan rumah tangga pada industri makanan, minuman dan tembakau., yaitu sebanyak 35.928 orang, dan terbanyak kedua pada industri kayu dan barang dari kayu sebanyak 26.140 orang. Berikut ini dirinci banyaknya tenaga kerja yang diserap pada masing-masing jenis industri yang ada.

Tabel 3.7  
Jumlah Tenaga Kerja Pada Berbagai Jenis Industri  
Di Kabupaten Kebumen

No	Jenis Usaha	Jumlah penduduk
1	Industri makanan, minuman, dan tembakau	36.386
2	Industri tekstil. Pakaian jadi, dan kulit	8.846
3	Industri kayu dan barang dari kayu	26.507
4	Industri kertas dan barang dari kertas	276

5	Industri kimia dan barang dari kimia, batubara	570
6	Industri barang galian bukan logam kec minyak bumi dan batubara	15.084
7	Industri logam dasar	54
8	Industri barang dari logam, mesin dan peralatan	321
9	Industri pengolahan lain	99
	Jumlah	85.143

Sumber: BPS Kab.Kebumen, 2001

Dilihat dari 85.143 jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah tenaga kerja terbesar terdapat pada kelompok industri kerajinan rumah tangga pada industri makanan minuman dan tembakau, yaitu sebanyak 36.386 orang atau 42,73 % dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, terbanyak ke dua adalah pada industri kayu dan barang dari kayu sebanyak 26.507 orang atau sebanyak 31,13% dari jumlah tenaga kerja pada bidang industri. Urutan terbanyak ketiga terdapat pada industri galian bukan logam sebanyak 15.084 orang atau 17,7 % dari jumlah tenaga kerja yang bekerja pada bidang industri.

Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, ternyata sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar dalam memberikan lapangan usaha, yaitu sebesar 39,7% disusul dengan sektor jasa sebesar 17,63% dan sektor perdagangan sebesar 17,38%

Tabel 3.8  
Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha

Sektor lapangan usaha	Jmh orang	Prosentase (%)
Pertanian	273.171	45
Peternakan	2.082	0,35
Nelayan	1.889	0,316
Industri	36.884	6,2
Perdagangan	65.794	11,07
Angkutan dan komunikasi	8.112	1,37
Jasa	95.314	16,05

Lain-lain	110.761	18,65
Jumlah	594.314	100

Sumber : BPS Kab. Kebumen,2001

#### D. Gambaran Umum BKK Di Kabupaten Kebumen

Keberadaan sarana dan lembaga ekonomi yang terdapat di Kabupaten Kebumen merupakan penunjang kegiatan ekonomi. Keberadaannya dapat memperlancar arus lalu lintas peredaran uang, yakni dengan cara membantu permodalan masyarakat dalam hal ini adalah memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan mampu menampung dana dari masyarakat. Salah satu sarana lembaga perekonomian yang dibahas kali ini adalah keberadaan BKK yang selama ini dianggap lebih mampu menyentuh rakyat kecil dalam membantu mengatasi masalah permodalan.

Di Kabupaten Kebumen, BPR/BKK merupakan salah satu BUMD dalam bentuk perusahaan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen sendiri mengelola 4 perusahaan daerah yaitu: PDAM, PD Apotik Lukulo, PD BPR Bank Pasar, dan PD BPR/BKK. PDAM, PD BPR Bank Pasar, dan PD Apotik Lukulo merupakan Perusda yang milik Pemkab Kebumen, sedangkan PD

BPR/BKK sahamnya dimiliki oleh 3 pemilik, yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT. Bank BPD Jawa Tengah. Keberadaan BKK tersebar di 22 lokasi kecamatan. Dari jumlah tersebut 20 unit diantaranya telah berstatus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan izin dari Bank Indonesia.

PD BPR/BKK merupakan salah satu kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Oleh karena itu, peningkatan kontribusinya dalam hal ini adalah berupa setoran deviden ke kas daerah merupakan tuntutan yang tak dapat dielakkan lagi. Deviden yang diserahkan merupakan bagian dari laba usaha yang besarnya adalah 50% dari laba bersih yang bersangkutan. Jumlah tersebut kemudian dibagi kepada 3 pemilik modal yaitu Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan PT Bank BPD Jawa Tengah secara proporsional sesuai dengan jumlah setoran modal pada masing-masing PD BPR/BKK .

Setelah dilaksanakan kebijakan penambahan modal dari Pemerintah Kabupaten Kebumen yang dibagikan kepada 22 BKK, terbukti terjadi peningkatan pada perolehan deviden, yaitu pada tahun 2001 deviden yang disetor sebesar Rp 96.623.000,00 sedang pada tahun 2002 naik menjadi Rp 186.853.000,00. Berikut ini adalah perkembangan terakhir yang dapat disampaikan mengenai usaha BPR/BKK di Kabupaten Kebumen selama ini.

Tabel 3.9  
Perkembangan Usaha PD BKK se-Kab. Kebumen  
(per April 2003)

Besaran	Rencana Tahun 2003	Realisasi 2003	Prosentase (%)
Aset	35.926.303	34.922.784	97,21
Kredit	30.818.339	30.017.085	97,40
Damas	23.222.146	22.860.210	98,44
Pendapatan	10.812.461	3.804.025	35,18
Biaya	9.789.922	3.385.142	34,58
Rugi/laba	1.022.539	418.883	40,96

Sumber: BP BKK Kab. Kebumen, 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa prosentase realisasi yang paling besar terdapat pada dana masyarakat. Rencana dana yang terkumpul sebanyak Rp 23.222.146,00 dan realisasinya adalah sebanyak Rp 22.860.210,00. Dana masyarakat dihimpun dari dua macam, yaitu tabungan dan deposito. Urutan kedua prosentase realisasi terbesar adalah total kredit yang tersalur, yaitu sebesar 97,40% dari rencana sebesar Rp 30.80.339,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.017.085,00. Untuk total aset terealisasi sebesar 92,21%, rugi/laba sebesar 40,96%, total pendapatan sebanyak 35,18% dan total biaya sebanyak 34,58%. Jumlah nasabah yang mengambil kredit pada waktu itu adalah sebanyak 31.740 orang, nasabah tabungan 66.564 orang, dan nasabah deposito sebesar 1.899 orang. Berikut ini adalah perincian jumlah nasabah di seluruh BKK di Kabupaten Kebumen.

Tabel 3.1.0  
Jumlah Nasabah BKK Di Kabupaten Kebumen  
( per April 2003)

No	BKK	Jumlah nasabah
----	-----	----------------

		Kredit	Tabungan	Deposito
1	Rowokele	1.241	3.652	113
2	Petanahan	1.436	2.778	65
3	Sempor	1.998	7.033	166
4	Buayan	2.406	4.952	27
5	Ayah	1.825	2.253	230
6	Mirit	1.720	2.525	68
7	Puring	1.745	4.303	53
8	Gombong	2.100	4.156	234
9	Alian	1.476	3.939	69
10	Karanggayam	1.543	2.431	18
11	Karanganyar	671	1.734	49
12	Kuwarasan	910	3.265	77
13	Ambal	3.203	2.010	23
14	Adimulyo	942	1.210	37
15	Klirong	1.138	2.721	33
16	Kebumen	1.450	4.301	95
17	Kutowinangun	1.318	4.399	90
18	Prembun	1.029	1.977	134
19	Sadang	611	2.477	31
20	Pejagoan	856	1.883	132
21	Blspesantren	1.177	2.114	63
22	Sruweng	945	841	92
	Jumlah	31.740	66.564	4.100

Sumber: BP BKK Kab. Kebumen, 2003

Jumlah nasabah di BKK kabupaten Kebumen terbanyak pada tahun 2003 menurut data dari Badan Pengawas BKK adalah nasabah yang mengambil tabungan, yakni berjumlah 66.564 orang, kemudian disusul nasabah yang mengambil kredit sebanyak 31.740 orang, dan yang terakhir adalah nasabah yang mengambil deposito. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nasabah yang mengambil kredit terbanyak ada pada BKK Ambal, yaitu sebanyak 3.203 nasabah, kemudian disusul oleh BKK Buayan yang memiliki nasabah sebanyak 2.406 nasabah, dan urutan ketiga adalah BKK Kecamatan Gombong yang memiliki nasabah kredit sebanyak 2.100 nasabah. Jumlah nasabah yang mengambil tabungan terbanyak adalah di BKK Sempor, yaitu sebanyak 7.033

nasabah, disusul oleh BKK Buayan sebanyak 4.952 nasabah. Nasabah yang mengambil deposito terbanyak adalah di BKK Gombang, sebanyak 234 nasabah kemudian terbanyak ke dua adalah BKK Ayah yang memiliki 230 nasabah yang mengambil deposito.





## **BAB IV ANALISIS DATA**

Pada bab ini akan dibahas tentang data serta hasil analisis estimasinya. Data yang diperoleh penulis adalah data primer yang diperoleh dari para responden serta data sekunder yang diperoleh dari bagian perekonomian Pemda Kabupaten Kebumen. Data primer diperoleh dengan wawancara dan menyebar kuesioner kepada para responden sebanyak 100 orang yang dibagi dalam 5 buah BKK. Dari masing-masing sampel BPR BKK tersebut diambil sampel 20 orang yang menjadi nasabah dan mengambil kredit di BPR BKK tersebut.

Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis trend, dan uji hipotesis dua proporsi. Analisis linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis pertama, yaitu mengetahui pengaruh tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jangka waktu pengembalian kredit serta tujuan pengambilan kredit terhadap jumlah kredit yang diambil oleh nasabah. Untuk menguji hipotesis yang ke dua digunakan analisis trend dan uji hipotesis beda dua proporsi. Analisis trend untuk mengetahui perkembangan/trend besar penyaluran kredit dari tahun ke tahun, sedang uji hipotesis beda dua proporsi untuk mengetahui proporsi nasabah dalam memanfaatkan kredit yang diambil untuk tujuan produktif (mengembangkan usahanya) dibandingkan dengan proporsi nasabah yang memanfaatkan kreditnya untuk tujuan di luar produktif.

### **Karakteristik Responden**

Untuk dapat memperjelas karakteristik masing-masing variabel, maka perlu dikelompokkan variabel-variabel tersebut dalam suatu distribusi frekuensi. Menurut macam klasifikasi yang diadakan, distribusi frekuensi dibedakan 2 (Djarwanto,1993:56) :

Distribusi frekuensi kategorikal

Distribusi frekuensi numerikal

Distribusi frekuensi kategorikal (distribusi frekuensi kualitatif) jika pengelompokkan berdasarkan keterangan kualitatif, bukan suatu besaran bilangan. Sebaliknya, distribusi frekuensi numerikal didasarkan pada keterangan kuantitatif,

yakni merupakan besaran bilangan. Cara untuk membentuk distribusi frekuensi numerikal adalah dengan membagi ke dalam klas-klas.

Klas-klas ini biasanya kita tentukan berdasarkan tujuan kita membentuk suatu distribusi frekuensi. Untuk dapat membentuk jumlah klas dari sekumpulan data tertentu kita dapat menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Herbert A. Sturges yang terkenal dengan *Sturges rule* (Djarwanto, 1993:60)

$$K = 1 + 3,322 \log n$$

Dimana: K adalah jumlah klas

n adalah jumlah individu

Karena data yang digunakan adalah 100 orang maka:

$$\begin{aligned} K &= 1 + 3,322 \log 100 \\ &= 7,644 = 8 \text{ (dibulatkan)} \end{aligned}$$

Kebaikan dari rumus ini adalah apabila kita hendak mengadakan perhitungan lebih lanjut dari distribusi yang kita bentuk. Untuk nilai ekstrim yang sangat besar atau kecil kita akan mendapatkan jumlah klas yang agak kurang tepat, maka harus disesuaikan.

Selanjutnya untuk dapat menentukan interval klas harus dihitung luas penyebaran (*range*), dengan rumus:

$$R = X_n - X_1$$

Dimana: R adalah luas penyebaran (*range*)

$X_n$  adalah nilai pengamatan yang tertinggi

$X_1$  nilai pengamatan terendah

Untuk mendapatkan interval klas adalah dengan membagi range dengan jumlah klas. Setelah didapat interval klas, lalu kita menentukan batas – batas klasnya.

### 1. Jumlah kredit yang diambil oleh responden

Interval klas dari data jumlah kredit yang diambil responden adalah:

$$R = 2.600.000 - 70.000$$

$$= 2.530.000$$

$$\text{Interval} = \text{Range} / k$$

$$= 2530.000 / 8$$

$$= 350.000 \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel 4.1  
Jumlah Kredit Yang Diambil Oleh Responden

No	Jumlah kredit yang diambil responden	Jumlah	%
1	0 - < 350.000	37	37
2	350.000 - < 700.000	25	25
3	700.000 - < 1.050.000	24	24
4	1.050.000 - < 1.400.000	2	2
5	1.400.000 - < 1.750.000	5	5
6	1.750.000 - < 2.100.000	6	6
7	2.100.000 - < 2.450.000	0	0
8	2.450.000 - < 2.800.000	1	1
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer, diolah

Berdasarkan hasil survey, jumlah kredit yang paling banyak diambil oleh responden adalah pada Rp 350.000,00 ke bawah yang mencapai 37 orang atau

mencapai 37 persen dari keseluruhan responden. Kredit yang paling kecil diambil oleh responden adalah Rp 70.000,00 dan kredit yang paling besar diambil oleh responden adalah Rp 2.600.000,00

## 2. Jumlah pendapatan responden

Interval klas dari tingkat pendapatan responden adalah

$$R = 1.200.000 - 100.000$$

$$= 1.100.000$$

$$\text{Interval} = \text{Range} / k$$

$$= 1.100.000 / 8$$

$$= 137.500 = 150.000 \text{ (dibulatkan)}$$

Tabel 4.2  
Tingkat Pendapatan Yang Dimiliki Responden

No	Tingkat Pendapatan	Jumlah	%
1	0 - < 150.000	3	3
2	150.000 - < 300.000	14	14
3	300.000 - < 450.000	20	20
4	450.000 - < 600.000	16	16
5	600.000 - < 750.000	19	19
6	750.000 - < 900.000	19	19
7	900.000 - < 1.050.000	8	8
8	1.050.000 - < 1.200.000	1	1
	<b>Jumlah</b>	100	100

Sumber: Data primer, diolah

Tingkat pendapatan yang dimiliki oleh sebagian besar responden adalah antara Rp 300.000,00 sampai < Rp 450.000,00, yaitu sebesar 20 persen dari keseluruhan responden. Sedangkan pendapatan dengan jumlah terkecil adalah responden yang berpendapatan antara Rp 1.050.000,00 sampai < Rp 1.200.000,00. Pendapatan terbesar dari responden adalah Rp 1.200.000,00, sedangkan pendapatan terkecil adalah Rp 100.000,00

### 3. Jangka waktu pengembalian

$$R = 30 - 2$$

$$= 28$$

$$\text{Interval} = \text{Range} / k$$

$$= 28 / 8$$

$$= 4$$

Tabel 4.3  
Jangka Waktu Pengembalian Kredit

No	Jangka waktu (bulan)	Jumlah	%
1	0 - < 4	48	48
2	4 - < 8	15	15
3	8 - < 12	8	8
4	12 - < 16	11	11
5	16 - < 20	4	4
6	20 - < 24	2	2
7	24 - < 28	10	10
8	28 - < 32	2	2
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer, diolah

Jenis jangka waktu kredit dapat dibedakan menjadi dua sistem kredit minggon dan sistem bulanan. Jangka waktu sistem kredit minggon adalah 12 minggu atau

3 bulan, sedangkan sistem bulanan 1 sampai dengan 36 bulan. Bunga yang dikenakan kepada para nasabahpun berbeda-beda, untuk sistem minggon besar suku bunga 40 % per tahun, sedang sistem bulanan 24% sampai dengan 30 % per tahun. Jangka waktu yang paling banyak diambil oleh responden adalah di bawah 4 bulan, yaitu sebesar 48 % , karena banyak responden yang mengambil sistem kredit minggon.

#### 4. Lama pendidikan

Distribusi frekuensi lama pendidikan didasarkan pada keterangan kualitatif, karena merupakan distribusi frekuensi kategorikal. Pengelompokan frekuensinya dibedakan menurut kategori pendidikan yang pernah ditamatkan oleh responden.

Tabel 4.4  
Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Responden

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	%
1	Tidak tamat SD	7	7
2	Tamat SD	36	36
3	Tamat SLTP	26	26
4	Tamat SLTA	18	18
5	Tamat Akademi	4	4
6	Tamat PT	9	9
	Jumlah	100	100

Sumber: Data primer, diolah

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh para responden sebagian besar hanya tamat SD, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 36 % dari seluruh responden. Sebanyak 7 orang tidak tamat SD atau sekitar 7 % dari seluruh jumlah responden, tamat SLTP sebanyak 26 %, tamat Akademi sebanyak 4 % dan tamat Perguruan Tinggi sebanyak 9 %

#### 5. Pekerjaan responden

Pengelompokan pekerjaan responden merupakan distribusi frekuensi kategorikal, karena hanya berdasarkan keterangan kualitatif. Yang menjadi responden penulis adalah semua nasabah yang mengambil kredit di BKK, baik yang mengambil sistem minggon maupun sistem bulanan, sehingga pekerjaan para respondenpun bermacam-macam

Tabel 4.5  
Jenis Pekerjaan Responden

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	8	8
2	Pedagang	54	54
3	Buruh	26	26
4	Pegawai Negeri	12	12
	Total	100	100

Sumber : Data primer, diolah

Sebagian besar responden dari BKK adalah pedagang, sesuai dengan tujuan didirikan BKK yaitu membantu permodalan para pengusaha kecil di daerah pedesaan. Berdasarkan hasil survey, sebanyak 54 % responden memiliki pekerjaan sebagai pedagang kecil. Tidak semua nasabah merupakan para pengusaha kecil, namun ada juga yang berprofesi sebagai petani, buruh, bahkan pegawai negeri. Sebanyak 8 % responden adalah petani, 26 % adalah buruh, dan sebanyak 12 % adalah pegawai negeri

#### 6. Tujuan Penggunaan kredit

Nasabah yang mengambil kredit memiliki motif yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Berikut ini perincian dari tujuan pengambilan kredit oleh responden yang diambil oleh penulis.

Tabel 4.6  
Distribusi Responden berdasarkan Tujuan Penggunaan Kredit

No	Kategori Tujuan/ penggunaan kredit	Jumlah	Persentase
1	Untuk mengembangkan usaha	78	78
2	Untuk biaya pendidikan	10	10
3	Untuk biaya kebutuhan sehari-hari	8	6
4	Untuk lain-lain	4	6

	Jumlah	100	100
--	--------	-----	-----

Sumber: Data primer, diolah

Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menggunakan kreditnya untuk mengembangkan usahanya, yakni sebanyak 78%, sedangkan terbesar ke dua adalah digunakan untuk biaya pendidikan, sebanyak 19 % Sisanya digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari dan lain-lain.

## Analisis Data

### 1. Analisis Regresi Berganda

Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan alat uji regresi berganda dengan menggunakan variabel dummy. Model analisis dari persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

$$K = \beta_0 + \beta_1 Y + \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + \beta_4 D_1 + \mu_1$$

Dimana:

K = Jumlah kredit yang diambil oleh nasabah (Rupiah)

Y = Jumlah pendapatan tiap bulan (Rupiah)

X<sub>1</sub> = Lama pendidikan ditempuh (tahun)

X<sub>2</sub> = Jangka waktu pengembalian (bulan)

D<sub>1</sub> = Variabel Dummy, untuk tujuan pengambilan kredit

β<sub>0</sub> = Intersep / konstanta

β<sub>1</sub>, β<sub>2</sub>, β<sub>3</sub>, β<sub>4</sub> = Koefisien atau parameter

μ<sub>1</sub> = variabel pengganggu

Dengan menggunakan persamaan regresi linear berganda dengan program e views, maka didapat hasil estimasinya sebagai berikut:

Tabel 4.7



## Hasil Estimasi

Variabel	Koefisien	t- hitung	S E	Prob
C	- 247808,6	- 2,607327	95043,15	0,0106
Y	0,771960	3,553806	0,217221	0,0006
X <sub>1</sub>	14601,86	1,392478	10486,25	0,1670
X <sub>2</sub>	25447,78	4,316935	5894,871	0,0000
D <sub>1</sub>	179056,2	2,446827	73178,92	0,0163

Sumber: Data primer diolah

R squared = 0,622046

Adjusted R squared = 0,606132

Durbin Watson stat =2,093663

F stat = 39,08833

Prob ( F-statistic) = 0,00000

**a. Pengujian variabel independen secara individu ( uji t)**

Hipotesis : Ho :  $\alpha = 0$

Ho :  $\alpha \neq 0$

Ho diterima jika  $- t_{\alpha / 2} \leq t_{\text{hitung}} \leq t_{\alpha / 2}$

Ho ditolak jika  $t_{\text{hitung}} > t_{\alpha / 2}$  atau  $t_{\text{hitung}} < - t_{\alpha / 2}$

Atau dengan membandingkan nilai probabilitasnya. Jika probabilitas  $> 0,05$

maka Ho diterima pada tingkat  $\alpha = 5\%$ , sebaliknya jika probabilitasnya  $< 0,05$ .

maka Ho ditolak

1) Pengujian variabel pendapatan terhadap tingkat kredit diperoleh nilai t

hitung = 3,553806 probabilitas = 0,0006, t tabel = 1,980

Kesimpulan :

Oleh karena nilai t hitung  $> t$  tabel, atau probabilitasnya  $< 0,05$ , maka Ho ditolak, artinya koefisien regresi itu signifikan pada tingkat 5 %. Dengan demikian terdapat pengaruh antara tingkat pendapatan dengan jumlah kredit yang diambil oleh nasabah.

- 2) Pengujian variabel lama pendidikan terhadap terhadap jumlah kredit diperoleh  $t$  hitung = 1,392478 nilai probabilitasnya = 0,1670  $t$  tabel = 1,980

Kesimpulan :

Oleh karena  $t$  hitung <  $t$  tabel atau nilai probabilitas > 0,05, maka  $H_0$  diterima, artinya koefisien regresi itu tidak signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan secara statistik tidak berpengaruh terhadap jumlah kredit pada tingkat 5%. Hal ini disebabkan karena lama pendidikan bukan menjadi penilaian bagi para nasabah untuk dapat mengambil kredit. Seseorang dinilai mampu untuk dapat mengembalikan pinjamannya tidak dilihat dari lama pendidikannya. Selain itu, besar kebutuhan kredit seseorang tidak ditentukan oleh tingkat pendidikannya, karena belum tentu orang yang berpendidikan memiliki kebutuhan kredit yang lebih besar.

- 3). Pengujian variabel jangka waktu pengembalian kredit terhadap jumlah kredit diperoleh nilai  $t$  hitung = 4,316935 prob-nya 0,0000,  $t$  tabel = 1,980

Kesimpulan : Oleh karena nilai  $t$  hitung >  $t$  tabel atau probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya koefisien regresi signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel jangka waktu berpengaruh terhadap nilai kredit pada taraf 5%

- 4). Pengujian variabel tujuan pengambilan kredit terhadap jumlah kredit diperoleh  $t$  hitung = 2,446827 probabilitasnya 0,0163,  $t$  tabel = 1,980

Kesimpulan :

Oleh karena nilai  $t$  hitung >  $t$  tabel atau probabilitas < 0,05 maka  $H_0$  ditolak, artinya koefisien regresi signifikan pada tingkat 5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pengambilan kredit berpengaruh terhadap jumlah kredit

#### **b. Pengujian Variabel independen secara bersama-sama (uji F)**

Pengujian dengan Uji F ditujukan untuk menguji apakah secara keseluruhan dari variabel-variabel bebas (independen) mempengaruhi jumlah kredit..

Hipotesis :  $H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$

$H_a : \alpha_1 \neq \alpha_2 \neq \alpha_3 \neq \alpha_4 \neq 0$

$H_0$  diterima bila  $F$  hitung <  $F$  tabel

$H_0$  ditolak bila  $F$  hitung >  $F$  tabel

Diperoleh hasil F hitung adalah sebesar 39,08833 dengan probabilitas (Fstat) adalah 0,0000 dan F tabel = 2,45

Kesimpulan :

Oleh karena F hitung > F tabel atau Probabilitas (F stat) < 0,05 maka Ho ditolak. Dengan menolak Ho berarti secara bersama-sama ada pengaruh positif antara variabel-variabel bebas yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jangka waktu, serta tujuan pengambilan kredit berpengaruh secara signifikan pada taraf 5 % terhadap jumlah kredit.

**c. Koefisien determinasi Majemuk ( R<sup>2</sup> )**

Pengukuran terhadap R<sup>2</sup> yaitu mengukur seberapa besar variasi variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Dari hasil estimasi regresi di atas diperoleh nilai koefisien sebesar 0,60 berarti bahwa 60 % variasi kredit dipengaruhi oleh variasi independen yang digunakan dalam model, yaitu tingkat pendapatan, jangka waktu kredit, lama pendidikan serta tujuan pengambilan kredit, sedangkan sisanya sebesar 40 % dipengaruhi oleh variabel diluar persamaan.

**d. Uji Asumsi klasik**

1) Autokorelasi

Adalah adanya keadaan di mana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada varian lain yang tidak random. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diamata tidak bias dan variannya tidak minimum sehingga tidak efisien untuk mendeteksi tidak adanya autokorelasi. Salah satu cara untuk menguji autokorelasi adalah dengan percobaan d (Durbin – Watson ).

$$d = 2 \left[ \frac{1 - \sum e_i e_{i-1}}{\sum e_i^2} \right]$$

Nilai d dari hasil estimasi adalah 2.093663

	Autokorelasi positif	Ragu-ragu	Tdk ada autokorelasi	Ragu-ragu	Autokorelasi negatif	
	0	1.59	1.76	2	2.24	2.41

Gambar 4.1  
Uji Autokorelasi

Karena nilai d = 2,09 maka berada di daerah tidak ada autokorelasi.

2) Heteroskedastisitas

Terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heterokedastisitas adalah penaksir tidak bias, tapi tidak efisien, Salah satu cara untuk mendeteksi masalah heterokedastisitas adalah dengan Uji Park. Nilai residual hasil regresi dikuadratkan, lalu diregresikan dengan variabel bebas, dan dilakukan uji t. Jika signifikan maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak maka tidak terdapat heteroskedastisitas di dalamnya.

Tabel 4.8

Hasil Pengujian Variabel Independen Dengan Uji Park

Variabel Independen	t hitung	t tabel	Prob	Kesimpulan
Y	1,270445	1,980	0,2070	Homoskedastisitas
X1	-0,732081	1,980	0,4659	Homoskedastisitas
X2	1,588175	1,980	0,1156	Homoskedastisitas
D1	0,627700	1,980	0,5317	Homoskedastisitas

Sumber: Data primer, diolah

Hasil pengujian menunjukkan semua nilai t hitung < t tabel atau dilihat dari probabilitas > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

### 3). Multikolinearitas

Uji ini berarti ada hubungan yang sempurna atau pasti diantara beberapa variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika dalam model tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak dapat ditaksir dengan ketepatan yang tinggi. Dapat dilakukan dengan menggunakan Metode Klein, yaitu dengan membandingkan nilai  $r^2$  dengan  $R^2$ . Jika nilai  $r^2 < R^2$  maka dalam model tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas, sebaliknya jika nilai  $r^2 > R^2$  maka dalam model tersebut terdapat masalah multikolinearitas

Tabel 4.9

Hasil Pengujian Variabel Independen Dengan Metode Klein

Variabel Independen	$r^2$	$R^2$	Kesimpulan
Y dengan X <sub>1</sub>	0,522776	0,606132	Tdk terjadi multikolinearitas
Y dengan X <sub>2</sub>	0,411644	0,606132	Tdk terjadi multikolinearitas
Y dengan D <sub>1</sub>	0,019921	0,606132	Tdk terjadi multikolinearitas
X <sub>1</sub> dengan X <sub>2</sub>	0,275	0,606	Tdk terjadi

X <sub>1</sub> dengan D <sub>1</sub>	378	132	multikolinearitas
	0,000	0,606	Tdk terjadi
X <sub>2</sub> dengan D <sub>1</sub>	496	132	multikolinearitas
	0,020	0,606	Tdk terjadi
	878	132	multikolinearitas

Sumber: Data primer, diolah

Setelah dilakukan perbandingan antara nilai  $r^2$  dengan  $R^2$  di semua hasil perhitungan menunjukkan  $r^2$  lebih kecil dari  $R^2$  sehingga tidak terjadi adanya multikolinearitas diantara variabel-variabel independen tersebut.

#### e. Interpretasi Secara Ekonomi

Dari hasil pengolahan data, didapat fungsi persamaan regresi sebagai berikut

$$K = -247808,57 + 0,7719603Y + 14601,863 X_1 + 25447,778 X_2 + 179056,18 D_1$$

(-2,6073)      (3,5538)      (1,3924)      (4,3169)  
 (2,4468)

Dari hasil komputer tersebut dapat diketahui berapa besar pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat koefisien regresi masing-masing variabel. Untuk konstanta  $\beta_0$  besarnya koefisien parameternya menunjukkan  $-247808,57$ , hal ini berarti bahwa variabel penjelas yaitu tingkat pendapatan, jangka waktu, tingkat pendidikan, serta tujuan pengambilan besarnya = 0, maka besar kredit yang diambil adalah sebesar  $-247808,57$  satuan.

##### 1) Pengaruh tingkat pendapatan terhadap jumlah pengambilan kredit

Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengambilan kredit adalah positif, bila semua variabel independen lain diabaikan. Hubungan yang positif berarti bahwa setiap kenaikan pendapatan, maka akan diikuti dengan kenaikan jumlah kredit yang diambil. Hal ini disebabkan oleh salah satu syarat dari pengajuan kredit adalah dengan dilihat dari tingkat pendapatannya tiap bulan. Variabel pendapatan memiliki koefisien regresi sebesar 0,7719603 artinya apabila terjadi kenaikan pendapatan sebesar satu satuan, maka besar kredit yang diambil akan meningkat sebesar 0,7719603. Dan sebaliknya, jika pendapatan yang diterima menurun sebesar satu satuan maka kredit yang diambil juga turun sebesar 0,7719603. Pengaruh dari tingkat pendapatan terhadap jumlah kredit cukup kuat, ditunjukkan dari tingkat probabilitasnya sebesar 0,0006 yang berarti pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$ , pendapatan berpengaruh terhadap jumlah kredit.

##### 2). Pengaruh lama pendidikan terhadap jumlah pengambilan kredit

Berdasarkan pengujian variabel independen secara individu (uji t), didapat bahwa lama pendidikan tidak signifikan pada tingkat  $\alpha = 5\%$ , maka kesimpulannya lama pendidikan tidak berpengaruh.

##### 3) Pengaruh jangka waktu terhadap jumlah pengambilan kredit

Jika semua variabel independen lain diabaikan, maka apabila terjadi kenaikan jangka waktu pengembalian kredit sebesar satu satuan, maka besar kredit yang diambil juga akan meningkat sebesar 25447,778 satuan dan sebaliknya semakin sedikit jangka waktu yang diambil, maka tingkat kredit yang diambil juga semakin turun. Salah satu faktor yang menyebabkan keeratan hubungan antara jangka waktu terhadap besar kredit yang diambil adalah dengan bertambahnya kredit yang diambil, supaya tidak merasa terlalu berat untuk mengangsurnya, maka jangka waktu yang diambil akan bertambah pula. Secara signifikan jangka waktu sangat berpengaruh terhadap jumlah kredit pada  $\alpha = 5\%$ , dengan tingkat probabilitas = 0,0000

- 4) Pengaruh tujuan pengambilan kredit terhadap tingkat pengambilankredit  
 $K = -247808,57 + 0,7719603Y + 14601,863 X_1 + 25447,778 + 179056,18D_1$   
 Untuk  $D_1 = 1$  ( Untuk tujuan produktif)  
 $K = -247808,57 + 179056,18 (1) = -176577,33$   
 Untuk  $D_1 = 0$  (untuk tujuan di luar produktif)  
 $K = -247808,57 + 179056,18 (0) = -247808,57$

Dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa bila semua variabel independen lain diabaikan, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara nasabah yang mengambil kredit untuk tujuan produktif dengan yang di luar tujuan produktif. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka jika nasabah menggunakan kreditnya untuk tujuan produktif asumsi variabel lain diabaikan, maka tingkat kredit adalah sebesar -176577,33 satuan tapi jika digunakan untuk tujuan di luar produktif maka besar kredit adalah -247808,57 satuan

## 2. Uji hipotesis proporsi

Untuk menguji hipotesis yang kedua, yaitu untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran kredit yang dilakukan oleh BKK adalah dengan menggunakan Uji hipotesis proporsi dan Analisis Trend. Uji hipotesis proporsi digunakan untuk menguji kegunaan kredit yang diambil oleh nasabah apakah sesuai dengan sasaran/tujuan kredit, yaitu untuk mengembangkan usahanya, sedangkan Analisis Trend digunakan untuk mengetahui trend perkembangan jumlah kredit yang telah tersalur selama ini.

Macam penggunaan pinjaman merupakan salah satu ukuran keberhasilan dari suatu lembaga kredit pedesaan. Semakin banyak memberikan kredit kepada kegiatan-kegiatan yang tambahan produktivitasnya tinggi, berarti semakin berhasil badan kredit tersebut (Mubyarto, 1987:137), oleh karena itu akan dibandingkan antara proporsi nasabah yang mengambil kreditnya untuk tujuan produktif dibandingkan dengan yang mempergunakan untuk tujuan konsumtif. Dari data yang didapat, hasilnya 78 % nasabah menggunakan kreditnya untuk tujuan produktif. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk membantu meningkatkan usaha atau investasi. Secara prosentase hipotesis ditolak, namun tetap harus dibuktikan dengan pengujian proporsi.

Langkah-langkah pengujian dua proporsi adalah sebagai berikut (Djarwanto, 1993: 214):

a. Menentukan formulasi  $H_0$  dan  $H_1$

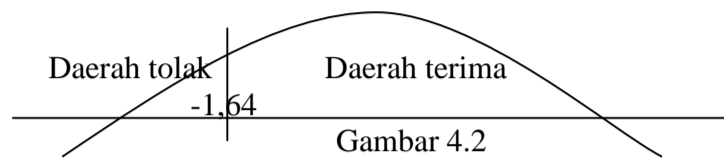
$$H_0 : P_0 = 50 \%$$

$$H_1 : P_0 > 50 \%$$

b. Menentukan level of signifikan

$$\alpha = 0,05$$

c. Rule of test



Gambar 4.2  
Uji Z

$H_0$  diterima apabila  $Z \geq -1,64$

$H_0$  ditolak apabila :  $Z < -1,64$

d. Perhitungan nilai Z

$$\frac{x}{n} = \frac{78}{100}$$

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{\frac{x}{n} - P_0}{\sqrt{\frac{P_0(1-P_0)}{n}}} \\
 &= \frac{\frac{78}{100} - \frac{50}{100}}{\sqrt{\frac{\frac{50}{100}(1 - \frac{50}{100})}{100}}} \\
 &= 0,56
 \end{aligned}$$

e. Kesimpulan

Ternyata Z hitung  $>$  Z tabel, atau  $0,56 > 1,64$ , jadi  $H_0$  ditolak, yakni  $P_0 > 50\%$ , artinya proporsi nasabah yang menggunakan kreditnya untuk tujuan produktif  $>$  daripada proporsi nasabah yang menggunakan kreditnya untuk tujuan konsumtif. Jadi, dapat disimpulkan penggunaan kredit dilihat dari proporsi penggunaan tujuan kredit untuk produktif dapat tercapai.

### 3. Analisis Trend

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penyaluran kredit dilihat dari trend jumlah kredit yang tersalur selama ini. Sebelum kita menghitung trend, harus diketahui persamaan regresi terlebih dahulu. Untuk mengetahui persamaan regresi dicari dengan menggunakan regresi sederhana

Tabel 4.1.0  
Jumlah Kredit Tersalur BKK Kab. Kebumen  
Tahun 2000 – 2003

Tahun	Jumlah Kredit
2000	14.721.495
2001	20.595.603
2002	26.249.762
2003	30.808.339

Sumber: Bag. Perekonomian Pemda Kebumen

Taksiran trend dihitung dengan ketentuan bahwa deviasi kuadrat antara tiap nilai deret waktu dengan nilai trend adalah minimum. Untuk tujuan tersebut kita menggunakan persamaan garis lurus ( *straight line equation* ) yang dinyatakan sbb:

$$Y = a + b x$$

Dimana : Y= Jumlah kredit yang tersalur tiap tahunnya

X = periode waktu

a= nilai Y apabila X= 0

b = besarnya perubahan variabel Y yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel X ( arah condong garis trend )

Tabel 4.1.1

Menghitung Trend garis Lurus Dengan Metode Kuadrat Terkecil

Tahun	Y ( dlm jutaan rupiah )	X (Deviasi dalam tahun
-------	----------------------------	---------------------------



		)
2000	14,721	-3
2001	0,595	-1
2002	26,249	1
2003	30,808	3

Dengan menggunakan analisis regresi sederhana didapat hasil sbb:

Tabel 4.1.2  
Hasil Regresi Sederhana

Variabel	Koefisien	Std error	t-statistik	Prob
C	23.09325	0.242535	95.21598	0.0001
X	2.695750	0.108465	24.85361	0.0016

Sumber: Data primer, diolah

R squared = 0,996773

Adjusted R squared = 0,995159

Durbin Watson stat = 2.113887

Prob F-stat = 0,001615

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa persamaan regresi adalah sbb:

$$Y = 23,093 + 2,695 X$$

Dalam persamaan regresi linear perlu dilakukan pengujian hipotesis terhadap nilai b, yaitu slope dari garis regresi tersebut dengan menggunakan Uji t Hipotesisnya adalah

Ho: koefisien regresi tidak signifikan

Hi : koefisien regresi signifikan

Signifikansi dapat dilihat dari probabilitasnya, bila probabilitasnya > 0,05 maka Ho diterima, jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Kesimpulan:

Periode waktu (X), probabilitasnya = 0,0016, maka probabilitasnya di bawah 5%, maka Ho ditolak atau koefisien regresi signifikan atau periode waktu benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah kredit tersalur.

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui bagaimana perkembangan trend tiap tahun:

$$\text{Tahun 2000 : } 23,093 + 2,695 (-3) = 15,008$$

$$\text{Tahun 2001 : } 23,093 + 2,695 (-1) = 20,398$$

$$\text{Tahun 2002 : } 23,093 + 2,695 (1) = 25,788$$

$$\text{Tahun 2003 : } 23,093 + 2,695 (3) = 31,178$$

Oleh karena garis regresi ini dapat digunakan sebagai peramalan, maka kita dapat meramalkan besarnya Y pada tahun-tahun berikutnya, misalnya pada dua tahun berikut, yaitu tahun 2004 dan 2005

Tahun 2004 :  $23,093 + 2,695 ( 5) = 36,568$

Tahun 2005 :  $23,093 + 2,695 ( 7) = 41,958$

Dengan mengetahui besar tend tersebut, kita dapat menargetkan besar kredit yang harus kita capai ditahun-tahun mendatang. Dari persamaan linear di atas, maka dapat disimpulkan bahwa besar perkembangan rata-rata jumlah kredit tersalur tiap tahun adalah sebesar Rp 2.695.000,00.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap data-data yang diperoleh, berikut ini disajikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil model regresi menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas, yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jangka waktu pengembalian, dan tujuan pengambilan kredit berpengaruh secara nyata

terhadap variabel terikat, tingkat kredit yang diambil pada taraf signifikansi  $\alpha = 5\%$ .

2. Variabel Y (tingkat pendapatan) berpengaruh positif dan secara statistik signifikan terhadap tingkat kredit. Pengaruh langsung terhadap tingkat kredit yang diambil adalah sebesar 0,7719603 satuan, artinya apabila variabel-variabel lain dianggap tetap, maka bila terjadi kenaikan Y sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan tingkat kredit yang diambil naik sebesar 0,7719603 satuan
3. Variabel  $X_1$  (lama pendidikan) secara statistik tidak berpengaruh terhadap tingkat kredit yang diambil. Hal ini disebabkan faktor tingkat pendidikan tidak dijadikan penilaian oleh BKK dalam pengambilan tingkat kredit oleh nasabah, dan dikarenakan kebutuhan kredit seseorang tidak dapat ditentukan oleh tingkat pendidikannya.
4. Variabel  $X_2$  (jangka waktu pengembalian) berpengaruh positif dan secara statistik signifikan. Pengaruh langsung terhadap tingkat kredit adalah sebesar 25447,778 satuan, berarti apabila terjadi kenaikan  $X_2$  sebesar satu satuan maka K naik sebesar 25447,778 satuan.
5. Variabel tujuan pengambilan kredit ( $D_1$ ) berpengaruh positif dan secara statistik signifikan. Apabila  $D_1 = 1$  (untuk tujuan produktif) dengan menganggap faktor lain konstan, maka besar kredit adalah sebesar -76577,33 satuan dan jika  $D_1 = 0$  (untuk tujuan di luar produktif), maka besar kredit adalah sebesar -247808,57 satuan

6. Pengukuran terhadap  $R^2$  yaitu untuk mengukur seberapa besar variasi variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen. Dari hasil estimasi regresi diperoleh nilai koefisien sebesar 0,606132, ini berarti bahwa sebesar 60% variasi tingkat kredit dipengaruhi oleh variabel lain di luar model tersebut.
7. Pengujian terhadap pelaksanaan penyaluran kredit dilihat dari penggunaan kredit oleh nasabah menggunakan uji dua proporsi, terbukti secara statistik bahwa proporsi tujuan untuk produktif lebih besar dibandingkan untuk tujuan lain. Hal ini menunjukkan bahwa kredit yang tersalur sudah dapat mencapai sasaran. Sebesar 78% nasabah menggunakan kreditnya untuk mengembangkan usaha, dan sisanya untuk biaya pendidikan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lain-lain.
8. Dari hasil analisis trend didapat hasil bahwa total kredit yang tersalur tiap tahunnya memiliki trend positif. Rata-rata peningkatan tiap tahun dihitung dari tahun 2000 adalah sebesar Rp 2.695.000,00

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengkajian terus menerus untuk meningkatkan jumlah kredit tersalur di BPR/BKK dengan metode “jemput bola” yang sudah dilakukan selama ini, yang artinya pihak BKK bersikap proaktif dalam melayani nasabah. Selain itu, masyarakat agar lebih mengenal dan tertarik terhadap

BKK, dilakukan penyuluhan- penyuluhan di setiap pertemuan di desa oleh petugas.

2. Kebijakan yang perlu dilaksanakan adalah berkaitan dengan faktor jangka waktu pengembalian kredit. Untuk dapat meningkatkan jumlah kredit yang tersalur, maka sebaiknya faktor jangka waktu pengembalian kredit perlu diperhatikan, karena dengan jangka waktu yang lama akan meringankan angsuran nasabah dalam mengembalikan kreditnya.
3. Untuk menghindari timbulnya tunggakan terhadap pembayaran kredit, maka perlu dilakukan analisa terhadap para nasabah yang mengambil kredit terlebih dahulu. Faktor pendapatan merupakan faktor penilaian yang penting dalam melakukan analisa terhadap tingkat kredit yang diambil, dan tanpa memandang hubungan yang erat antara petugas dan nasabah.

